

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID
(STUDI KASUS 5 MASJID DI MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

M ALQODRI PRATAMA

NIM : 27133024



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID
(STUDI KASUS 5 MASJID DI MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negri Sumatera Utara

Oleh :

M ALQODRI PRATAMA

NIM : 27133024



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

Penelitian M Alqodri Pratama (2017), **Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid di Medan)**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Hendra Hermain SE, M.Pd** dan Bapak **Aqwa Naser Daulay, M.Si** Ssebagai Pembimbing Skripsi II.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntansi yang telah dilakukan masjid-masjid dengan yang masih belum menerapkan prinsip akuntansi sehingga akuntabilitas laporan keuangannya bisa diandalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis serta mendeskripsikan Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan penelitian lapangan dengan bentuk wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis isi. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan prinsip akuntansi sangat besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban laporan keuangan masjid. Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai sumber dapat diketahui bahwasanya prinsip-prinsip yang kurang diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan masjid yaitu prinsip pengungkapan sepenuhnya dan prinsip realisasi, sehingga akuntabilitas laporan keuangan masjid menjadi kurang transparan. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid tersebut pengelola masjid memiliki kesamaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan masjid, namun berbeda dalam pembuatan laporan keuangannya.

Kata Kunci : Prinsip Akuntansi, PSAK 45 Akuntabilitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid di Medan)**”. Shalawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda rasul Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat manusia di dunia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi SI Ekonomi Islam Jurusan Akuntansi Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Sumadi dan Ibunda tersayang Dayati sebagai salah satu ucapan terimakasih penulis yang sedalam-dalamnya, semoga penyelesaian skripsi ini bisa mengobati sedikit rasa lelah dan jerih payah Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang serta dapat membingkai raut bangga dan senyum bahagia diwajahnya. Terimakasih juga kepada saudara kandungku tersayang Ria Aprilia yang selalu menyemangati dan mendo'akan yang terbaik untukku.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Hendra Hermain, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Kamila SE, Ak, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hendra Hermain SE, M.Pd selaku dosen Pembimbing Skripsi I penulis, yang telah banyak memberikan arahan sehingga kripsi ini layak untuk diselesaikan.
6. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang senantiasa meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, tanpa bantuan beliau mungkin skripsi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan.
7. Bapak Arbie Abdul Gani selaku Bendahara Masjid Medan yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan penelitian di Masjid Al-Musabbihin.
8. Bapak Mahmuzar Nasution selaku Bendahara Masjid Medan yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan penelitian di Masjid Agung
9. Bapak Ramli Mansyur selaku Ketua Masjid Medan yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan penelitian di Masjid Al-Falaah
10. Segenap staf, dosen, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terbaikku Faisal Tanjung, Ilmi Zikri Firdaus, Ahmad Kamal Nasution, Rizal Hasan, Anisatur Raihan, Muhammad Rozi yang selalu memberi semangat kepada penulis dari mulai perkuliahan hingga penulisan skripsi.
12. Kepada adik- adik tersayang M. Wahyudi Arrasyd dan Nurul Aulia Syafitri yang selalu memberi semangat dan do'a serta selalu merepetin penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Kepada teman-teman tercinta mahasiswa kelas Ekonomi Manajemen Syari'ah (AKS) A dan Ekonomi Manajemen Syari'ah (EMS) B yang

selama ini telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana Ekonomi Islam.

14. Dan seluruh teman-teman penulis yang mungkin tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran dan kritik dari semua pihak.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Jazakaallah Khaironkatsiron.

Medan, 08 Mei 2017

Penulis,

M. ALQODRI PRATAMA

NIM. 27133024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Terdahulu	6
E. Metodologi Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Lokasi Penelitian	8
3. Subjek Penelitian	8
4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	9
a. Wawancara	9
b. Observasi	9
c. Dokumentasi	9
d. Analisis Isi	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II GAMBAR UMUM MASJID DAN PERNYATAAN PRINSIP AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID

A. Pengertian Masjid.....	12
B. Struktur Dan Bagan Organisasi Masjid.....	15
C. Masjid dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	21
D. Hubungan Masjid dengan Laporan Keuangan	23
E. Pengertian Akuntansi	24
F. Prinsip Akuntansi	28

1. Pengertian Prinsip Akuntansi	28
2. Penggolongan Prinsip Akuntansi	29
G. Akuntabilitas	30
1. Sekilas Tentang Akuntabilitas.....	30
2. Akuntabilitas Pada Organisasi Keagamaan.....	31
3. Karakteristik dan Lingkungan Organisasi Keagamaan.....	31
H. Laporan Keuangan Masjid	35
1. Pengertian Laporan Keuangan	35
I. Komponen Laporan Keuangan Masjid	37
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan).....	37
2. Laporan Operasional	38
3. Laporan Arus Kas.....	39
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	40
J. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Masjid	48
1. Aset.....	48
2. Kewajiban.....	49
3. Net Aset (Ekuitas)	49
4. Pendapatan	49
5. Beban.....	51

BAB III LAPORAN KEUANGAN MASJID

A. Gambaran Umum Masjid Al-Musabbihin	53
1. Laporan Keuangan Masjid Al-Musabbihin.....	54
B. Gambaran Umum Masjid Agung Medan.....	68
1. Laporan Keuangan Masjid Agung Medan	69
C. Gambaran Umum Masjid Al-Jihad	81
1. Laporan Keuangan Masjid Al-Jihad	82
D. Gambaran Umum Masjid Al-Falaah.....	87
1. Laporan Keuangan Masjid Al-Falaah Medan	88
E. Gambaran Umum Masjid Ar-Rahman Medan.....	90

1. Laporan Keuangan Masjid Ar-Rahman	90
--	----

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	92
a. Kontinuitas Usaha (<i>going concern</i>).....	92
b. Kesatuan Usaha (<i>Business entiti</i>).....	94
c. Prinsip periode Akuntansi (<i>Accounting periode</i>)	95
d. Prinsip Kesatuan Pengukuran (<i>Measurent Unit</i>).....	97
e. Prinsip Bukti yang Objektif (<i>Objektif Evidence</i>).....	98
f. Prinsip Pengungkapan Sepenuhnya (<i>Full Disclosure</i>).....	99
g. Prinsip Konsisten (<i>Consistency</i>)	101
h. Prinsip Realisasi (<i>Matching Expense With Revenue</i>).....	102
B. Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Masjid	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masjid sebagai lembaga keagamaan Islam merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid.

Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar Masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak tahu menahu bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini dijelaskan oleh surat Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Melihat begitu kompleksnya masalah keuangan disuatu masjid, peneliti akan meneliti mengenai pengelolaan keuangan di 5 (Lima) masjid yang berada di kawasan Medan. Ke-5 Masjid tersebut yaitu:

1. Masjid Al-Musabbihin yang berada Taman Setia Budi Indah Blok C No. 100 Medan.

2. Masjid Agung yang berada di Jl. Diponegoro No. 26 Medan
3. Masjid Al-Jihad yang berada di Jl. Abdullah Lubis No.55 Medan
4. Masjid Al-Falaah yang berada di Jl. Ibrahim Umar No.3 Medan Keluaran. Sei Kera Hilir I
5. Masjid Ar-Rahman yang berada di Jl. Serdang Medan

Dalam pembuatan keuangannya Masjid Al-Musabbihin sudah menggunakan Standar Akuntansi dalam membuat laporan keuangannya bulanan dan tahunan tersebut selain membuatnya dalam buku dan bendaharanya mempunyai gelar dibidang akuntansi, dan laporan keuangannya sudah di Audit oleh tim audit, dan Masjid Al-Jihad juga telah menggunakan Standar dan Prinsip Akuntansi dalam membuat laporan keuangan dan telah dibukukan dan juga telah di Audit dan bendaharanya juga mempunyai gelar dibidang akuntansi, dan Masjid Agung juga telah menggunakan prinsip akuntansi dan standar akuntansi dalam pembuatan laporan keuangannya dan sudah di Audit juga dan yang menjadi bendahara juga mempunyai gelar dibidangnya dan Masjid Al-Falaah hanya membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan. Kemudian yang menjadi bendahara juga mempunyai gelar dibidang ekonomi, jadi Masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, Masjid Al-Jihad dan Masjid Al-Falaah telah menempatkan orang yang sesuai pada bidangnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Masjid Ar-Rahman masjid ini tidak menggunakan standar dalam pembuatan laporan keuangannya. Hal ini sangat riskan dikarenakan rawan hilang dan rusak apabila pengurus menaruhnya disembarang tempat. Sedangkan SDM yang ditunjuk menjadi bendahara pada Masjid Ar-Rahman tidak mempunyai gelar dibidang ekonomi tetapi mempunyai gelar dibidang lain.

Namun dalam hal ini peneliti tertarik meneliti tentang laporan keuangan Masjid, apakah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara Masjid sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, atau belum sesuai dengan prinsip akuntansi, dan bagaimana pengurus masjid mempertanggungjawabkan mengenai laporan keuangan masjid tersebut.

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana para pengelola masjid khususnya pada bagian keuangannya di masing-masing masjid dalam

memberikan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Lalu diantara Ke -5 masjid-masjid di medan tersebut manakah yang lebih menerapkan Prinsip Akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangannya.

Didasari tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid di Medan)**).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan di masjid tersebut?
2. Seberapa besar prinsip akuntansi yang sudah diterapkan?
3. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan Masjid tersebut
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan masjid yang sesuai dengan prinsip akuntansi masjid
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi masjid
4. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengelola Masjid di Medan

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini., serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi

perbankan, khususnya mengenai pengelolaan di organisasi nirlaba seperti halnya Masjid.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pengelola Masjid

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja para pengelola masjid dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

b) Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pengelolaan keuangan di Masjid serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

D. Kajian Terdahulu

- 1) Desy Andikawati dalam skripsinya "*Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus pada Lembaga Masjid Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda)*", melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Tetapi setelah melakukan rekonstruksi laporan keuangan sederhana lebih cocok untuk di terapkan atau di sesuaikan dengan PSAK 109 di banding dengan PSAK 45 karena akun-akun yang terdapat di laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun-akun PSAK 109.
- 2) Roby Hanafi dalam skripsinya "*Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurussyifa' Surakarta)*" melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Nurussyifa' sangat sederhana namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun

dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

- 3) Jennifer Seftiany dalam skripsinya “ *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan mesjid (penelitian pada 36 mesjid besar di kota bandung)* melalui pendekatan metode deskriptif asosiatif menyebutkan dalam skripsinya Uji hhipotesis penelitian, penulis melakukannya dengan uji t untuk masing-masing variabel x1 dan x2, dan y. Dari hasil uji thitung akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid thitung (4,199) lebih besar dari ttabel (2,035), transparansi thitung (4,818) lebih besar dari ttabel (2,035). Maka dari hasil uji hipotesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima (Ho ditolak, Ha diterima) artinya terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid.

Untuk mencari besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid secara simultan penulis melakukannya dengan uji f dengan koefisien determinasi (Kd). Dari hasil uji fhitung >ftabel yaitu (33,790) lebih besar dari Ftabel (3,285). Hasil perhitungan tersebut bahawa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan nilai 67,2% sedangkan sisanya 32,8% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Selenjutnya didefenisikan bahwa metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dengan kakhasannya sendiri.

Pendekatan kualitatif merujuk dan menekankan pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur, dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang akan dijadikan sasaran penelitian.

Penelitian dilakukan di:

No	Nama Masjid	Alamat Masjid
1	Masjid Al-Musabbihin	Jl. Taman Setia Budi Indah Block C No. 100 Medan
2	Masjid Al-Jihad	Jl. Abdullah Lubis No.55 Medan
3	Masjid Al-Falaah	Jl. Ibrahim Umar No.3 Medan Kelurahan Sei Kera Hilir I
4	Masjid Agung	Jl. Diponegoro No. 26 Medan
5	Masjid Ar-Rahamn	Jl. Serdang Medan

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (*organisasi*). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.²

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah BKM (*Badan Kemakmuran Masjid*), dalam hal ini ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat

¹ Yusup Pawit M, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: kencana, 2007), h.23

² Ruslan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruszz Media, 2014), h. 98.

memberikan informasi respresentatif dan mempunyai akses dan pengaruh terhadap semua kegiatan operasional masjid.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Dalam pengumpulan data ini objek yang akan diwawancarai yaitu *ketua* masjid dan bendahara masjid. Dalam hal ini ketua masjid akan di wawancarai mengenai sejarah berdirinya masjid, dan *bendahara* masjid akan di wawancarai mengenai bentuk laporan keuangan masjid dan bagaimana masjid tersebut mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid tersebut kepada masyarakat.

b. Obsevasi

Metode obseravasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Pengambilan data dengan metode ini menggunakan mata tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi atau bantuan alat-alat standar lain untuk keperluan tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di masjid yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya laporan keuangan, struktur organisasi, visi misi, dan sebagainya.³

d. Analisis Isi

Analisis isi digunakan berkenaan dengan permasalahan, yaitu:

- 1) Data yang tersedia sebgaiian besar terdiri dari bahan-bahan yang berdokumentasi

³ Umar, Husein., *Desain Penelitian : MSDM dan Perilaku Karyawan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008) h. 20.

- 2) Memberikan unsur teori tertentu mengenai data tersebut, karena bahasa yang dipergunakan oleh subyek yang diteliti sangat sulit dipahami
- 3) Si peneliti memiliki kemampuan teknis karena sering kali volume materi melebihi kemampuan peneliti untuk menanganinya.⁴

5. Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat Deskriptif Kualitatif yang penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan data apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan bersifat manual. Jadi dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka
- b. Mengklarifikasikan materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.
- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila ada kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian secara logis serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

⁴ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 127

BAB II
GAMBAR UMUM MASJID DAN PERNYATAAN PRINSIP
AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
MASJID

A. Pengertian Masjid

Kata masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sujuudan*, yang berarti sujud menundukkan kepala sampai ketanah. Dari kata *sajada* kemudian terbentuk kata *masjid* (jamak: *masaajid*) yang artinya tempat sujud. Pengertian tempat sujud di sini tidak mengacu pada bangunannya-beratap atau tidak, terbatas atau tidak-yang pokok adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata *sajada* itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah semata.

Namun, dalam kenyataannya, masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga tempat kaum muslim melaksanakan berbagai aktivitas lainnya, seperti pendidikan, dakwa, dan budaya Islam. Pada bangunan masjid tertentu selain ruang utama yang berfungsi sebagai tempat shalat, terdapat juga ruang pertemuan (aula), kantor pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM), perpustakaan, bahkan ruang kuliah, seperti di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun (Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) masjid berfungsi sebagai tempat mengendalikan pemerintahan negara, termasuk menyusun strategi perang.

Di dalam Al-Qur'an istilah masjid ditemukan 19 kali, sedangkan istilah *sujud*, *sajada*, dan berbagai bentuknya ditemukan 92 kali. Kalau dikaitkan dengan pengertian diatas, masjid adalah suatu yang sangat universal. Al-Qur'an maupun sumber ajaran Islam lainnya, seperti hadis, tidak menjelaskan secara konkret bentuk bangunan masjid, dengan kata lain, tidak ada landasan dan aturan yang ditetapkan oleh Islam tentang bangunan masjid, yang menjadi syarat utama dalam

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. IX., h. 244.

arah hadap atau kiblat salat, yaitu Kakbah di kota Mekah. Pada bangunan masjid, arah kakbah dilambangkan atau ditandai dengan mihrab, yaitu ruangan kecil tempat imam memimpin salat berjamaah.

Dalam perkembangannya kemudian, pengertian masjid menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik shalat lima waktu maupun shalat Jum'at atau shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai suatu bangunan merupakan wujud atau aspek fisik dari kebudayaan Islam.

Di Indonesia kata masjid dilafalkan berbeda-beda, seperti *mesigit* (Aceh), dan *mesigi* (Jawa Barat), *meuseugit* (Aceh), dan *mesigi* (Sulawesi Selatan). Tidak hanya itu, ada penamaan tersendiri untuk bangunan masjid atau bangunan tempat salat yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak dipakai untuk shalat Jumat, yaitu musala-dengan berbagai nama atau sebutan, seperti *meunasah* (Aceh), *surau* (Minang), *langgar* (Jawa), *tajung* (Sunda), *suro* atau *mandersa* (Batak), dan *santren* (Lombok). Dalam khazanah kebudayaan Islam dikenal istilah *mashad* (masjid-makam), yaitu masjid yang dibangun di kompleks makam; dan masjid-madrasah (masjid-pesantren), yaitu masjid yang dibangun di kompleks pesantren. Di Iran dan India dikenal *idghah*, bahasa Persia untuk menyebut musala atau tempat salat terbuka, biasanya dipergunakan untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Meskipun bentuk konkret bangunan masjid tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat perintah untuk membangun masjid sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi yang artinya: Rasulullah menyuruh kepada kita agar membangun masjid di rumah kita dan ia memerintahkan agar kita selalu membersihkannya. Selain itu, agama Islam mengajarkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Menurut sebuah hadis, pahala salat berjamaah 27 derajat (27 kali lipat) dibandingkan salat sendirian. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, dirasa perlu mendirikan sebuah bangunan, di dalamnya jemaah melakukan shalat,

terbebas dari gangguan alam (panas dan hujan) dan lingkungan sekitarnya yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat. Bangunan inilah yang kemudian disebut masjid.⁶

Peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah ada dalam sejarah dan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw dan sahabat, yaitu dengan dibentuknya *baitul mal*.

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat. Peran masjid dengan baitul malnya sebagaimana dicontohkan para sahabat Rasulullah dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat sehingga dapat meretas masalah pengangguran dan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW pun telah mencontohkan dalam membina dan mengelola seluruh keperluan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, pendidikan, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya melalui masjid. Kuncinya pada pengelolaan masjidnya (*takmir*). Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai (1) pusat ibadah, (2) pusat pendidikan dan pengajaran, (3) pusat informasi Islam, (4) pusat pengkajian dan penyelesaian problematika umat dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Namun yang jelas pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan oleh Beliau sebagai pusat peradaban. Pusat sumber inspirasi dalam mengembangkan syiar dan kemajuan ideologinya. Rasulullah SAW berhasil membina masyarakatnya meskipun komposisi struktur masyarakat yang ada ternyata masyarakat dengan multi ras, multi etnis dan multi agama. Akhirnya, masyarakat bentukan Rasulullah menjadi masyarakat yang disegani dan dikagumi baik lawan maupun kawan dan menjadi pemimpin di dunia pada masanya.

Upaya agar lembaga masjid dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yakni sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka

⁶ Kartum setiawan. *Majid-Masjid Besejarah di Jakarta* (Jakarta: Erlangga: 2011), h 10

meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Lebih spesifik dapat dikatakan: Hal-hal apa dan bagaimana kita membuat masjid, jamaah sistem, sumber dana dan penggunaannya, dan kegiatannya sehingga masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, damai dalam siraman rahmat Allah SWT.

B. Struktur Dan Bagan Organisasi Masjid

Ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau rencana kerja, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus. Di dalam kegiatan rutin itu, misalnya saja, tercakup apa-apa saja yang dapat dilakukan didalam masjid. Kegiatan pemugaran atau perbaikan bangunan, misalnya, tergolong kedalam program khusus.

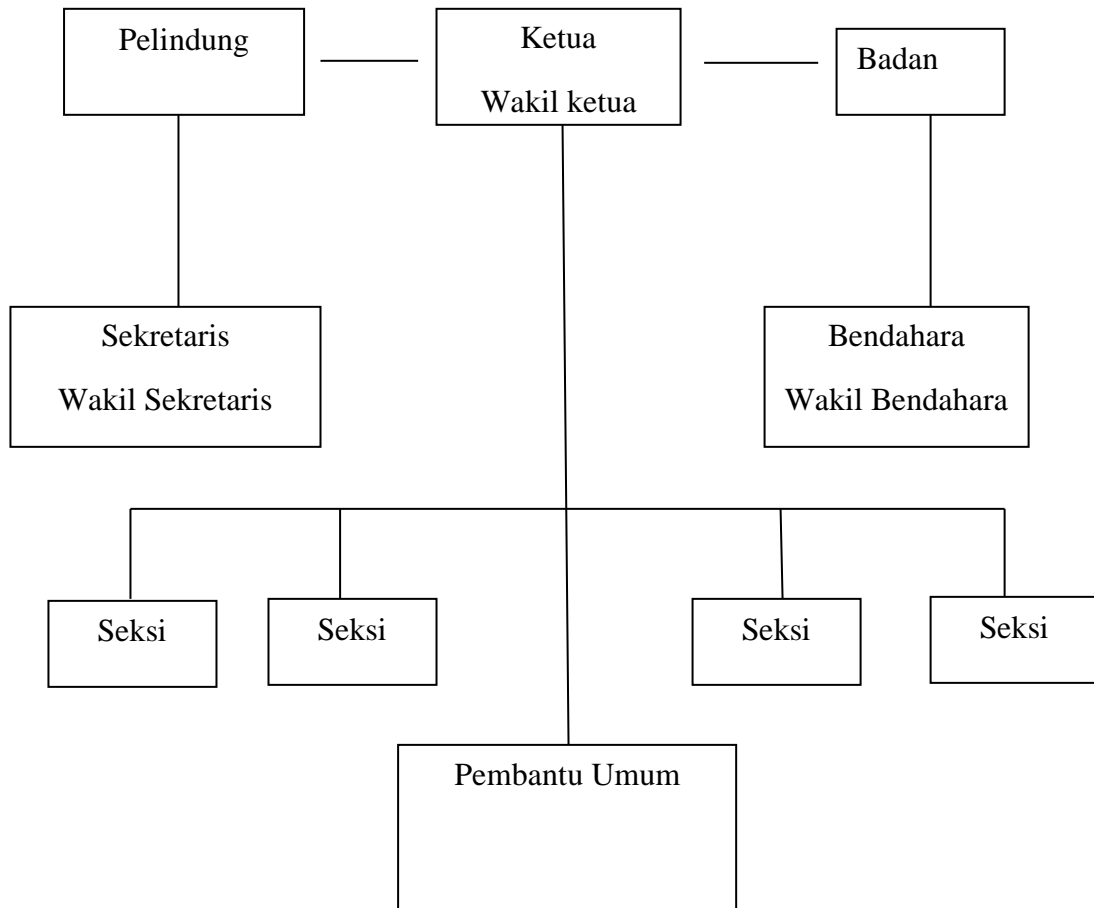
1. Struktur Organisasi Masjid

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit; adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi kegiatan yang berbeda-beda tersebut; dan adanya wewenang, garis pemberian tugas, dan laporan.

2. Bagan Organisasi Masjid

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi, yang didalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan/fungsi tertentu sebagai garis penegas wewenang atau hierarki.

Contoh Struktur dan Bagan Organisasi Masjid.



Gambar 2.1 Struktur dan bagan organisasi masjid

3. Pembagian Tugas Para Anggota Pengurus Masjid

a. Ketua

- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
- 2) Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam
- 3) Melaksanakan program dan mengamankan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 4) Menandatangani surat-surat penting, termasuk surat atau nota pengeluaran uang/ dana/harta kekayaan organisasi

- 5) Mengatasi segala permasalahan atas tugas yang dijalankan oleh pengurus masjid
 - 6) Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus; dan
 - 7) Mengelompokkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada jamaah
- b. Sekretaris
- 1) Mewakili ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada ditempat
 - 2) Memberikan pelayanan teknis dan administratif
 - 3) Membuat dan mendistribusikan undangan
 - 4) Membuat daftar hadir rapat/pertemuan
 - 5) Mencatat dan menyusun notulen rapat/ pertemuan
 - 6) Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretaris, yang mencakup
 - a) Membuat surat menyurat dan pengarsipannya
 - b) Memelihara daftar jamaah/ guru ngaji/ majelis taklim
 - c) Membuat laporan organisasi (bulanan, triwulan, dan tahunan) termasuk musyawarah-musyawarah pengurus masjid
 - 7) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua
- c. Bendahara
1. Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang-barang investasi, maupun tagihan
 2. Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana masjid serta mengendalikan pelaksanaan Rencana Anggaran Belanja Masjid sesuai dengan ketentuan
 3. Menerima, menyimpan, dan membukukan keuangan, barang, tagihan, dan surat-surat berharga
 4. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua

5. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang
 6. Membuat laporan keuangan rutin atau pembangunan (bulanan, triwulan, tahunan) atau laporan khusus; dan
 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
- d. Seksi Pendidikan dan Dakwa
1. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan dakwa yang meliputi:
 - a) Peringatan hari besar Islam, kegiatan majelis taklim dan pengajian-pengajian
 - b) Jadwal imam dan khatib Jum'at
 - c) Jadwal muazin dan bilal Jum'at
 - d) Shalat Idul Fitri dan Idul Adha
 2. Mengkoordinir kegiatan shalat Jum'at
 - a) Mengumumkan petugas khatib, imam, muazin, dan bilal Jum'at
 - b) Mengumumkan kegiatan –kegiatan yang ada hubungannya dengan unit kerja intren dan ekstren
 - c) Mengendalikan kegiatan remaja masjid, ibu-ibu, dan anak-anak
 - d) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua
 - e) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
- e. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
1. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pemabangunan dan pemeliharaan masjid yang meliputi;
 - a) Membuat program pembangunan masjid dan rehabilitasinya
 - b) Membuat rencana anggaran pembangunannya dan gambaran bangunannya

- c) Melaksanakan kegiatan pembangunan / rehabilitasi sesuai dengan program
 - 2. Mengatur kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di dalam dan di luar masjid
 - 3. Memelihara sarana dan prasarana masjid
 - 4. Mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid dan mengusulkan perbaikannya atau penggantinya
 - 5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua
 - 6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
- f. Seksi Peralatan dan Perlengkapan
- 1. Merencanakan, mengatur, dan menyimpan peralatan yang meliputi:
 - a) Menginventarisasi harta kekayaan masjid
 - b) Menyiapkan pengadaan peralatan untuk kelancaran kegiatan masjid
 - c) Mendata barang-barang yang rusak atau yang hilang dan menyusun rencana pengadaan atau pengganti
 - d) Mengatur dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan masjid
 - 2. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua
 - 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
- g. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
- 1. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi:
 - a) Santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan orang terlantar
 - b) Khitanan massal
 - c) Pernikahan
 - d) Kamatian

- e) Qurban/ akikah
 - 2. Melakukan koordinasi dengan pengurus RT/ RW dan pemuka agama/ toko masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya
 - 3. Melaksanakan kegiatan khusus yang diberikan oleh ketua
 - 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
- h. Pembantu UMUM
- Membantu secara umum kelancaran kegiatan pengurus masjid yang meliputi:
- 1. Penyampaian undangan
 - 2. Mengumpulkan infak/ sedekah/ amal jamriah/ zakat
 - 3. Mengajak warga masyarakat memakmurkan masjid
 - 4. Kegiatan-kegiatan lain (seperti penyuluhan dari pemerintah)⁷

C. Masjid dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

Masjid sebagai lembaga keagamaan Islam merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid.

⁷ Moh.E.Ayub.el.et. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press), hal 44

Akan tetapi, ilmu dan praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan seperti masjid masih kurang jadi perhatian. Ilmu akuntansi dan praktiknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan khususnya masjid sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya, seperti dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat, maka lembaga keagamaan menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berbeda dengan entitas publik lainnya, lembaga keagamaan merupakan entitas publik dan juga merupakan organisasi nirlaba yang berbeda dengan organisasi lainnya semana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No. 45,

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Dengan tercantumnya organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 menegaskan, bahwa praktik akuntansi ini ada dalam organisasi nirlaba khususnya lembaga keagamaan. Dimana lembaga keagamaan ini merupakan organisasi nirlaba yang berasaskan landasan pondasi prinsip agama yang dikembangkan, namun prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak sesuai dengan prinsip materialisme dan keduniawian.

Dikarenakan anggapan tersebut, praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi nirlaba lainnya menjadi tidak biasa. Walaupun tidak biasa atau umum, penelitian praktik akuntansi pada lembaga keagamaan seperti Masjid dan Gereja. Bahwa bagaimanapun juga sebagai lembaga keagamaan yang dipenuhi oleh landasan prinsip agama tentu saja setiap kegiatannya juga harus terhindar dari dosa atau hal-hal yang dilarang agama, sehingga penerapan akuntansi yang ada harus steril dari larangan Tuhan.

Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar Masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak tahu menahu bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada. Padahal bahwa praktik akuntansi merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas, dimana transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program di masjid. Disamping itu transparansi dan akuntabilitas dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan warga masjid melalui penyediaan informasi.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

D. Hubungan Masjid dengan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini dijelaskan oleh surat Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola

dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Setiap masjid tentu memiliki aktivitas yang berbeda tergantung sumber daya, karakter masing-masing masjid dan permasalahannya. Seperti yang diketahui masjid tidak hanya berdiri di pusat kota atau dilingkungan warga sekitar sebagai sarana peribadatan tetapi sekarang masjid telah berdiri megah di lingkungan perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi memiliki masjid sebagai sarana peribadatan mahasiswa, dosen, warga kampus lainnya serta masyarakat sekitar masjid kampus berdiri. Selain itu, masjid sendiri telah menjadi penunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa di bidang keagamaan, dan juga sama halnya dengan masjid besar, beberapa masjid kampus telah memiliki wadah penyaluran Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf (ZIFWAF) dari masyarakat sekitar. Meskipun hanya masjid kampus, pengelolaan keuangan di setiap organisasi maupun perusahaan, baik kecil atau besar pasti didalamnya terdapat pengelolaan keuangan yang hampir semuanya dituntut untuk transparan dan akuntabel. Sama halnya dengan masjid yang berada di lingkungan masyarakat, masjid kampus juga di dalamnya terdapat aktivitas pemasukan dan pengeluaran dana dari berbagai sumber.

E. Pengertian Akuntansi

Ada beberapa defenisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalah satunya adalah pengertian dan penjelasan yang dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.”

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat diketahui atau dikenal bahwa:

1. Fungsi (*peran*) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
3. Cabang – cabang akuntansi cukup banyak, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan.

Yang perlu diketahui dari defenisi di atas adalah “*entitas*” ekonomi. Entitas adalah “satuan” yang dapat berarti satuan organisasi, misalnya organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan, dan lain-lainnya. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi sektor publik. Oleh sebab pemerintah daerah merupakan suatu satuan organisasi yang non-profit maka dapat dipahami akan adanya akuntansi untuk pemerintahan daerah, dan akan termasuk dalam kelompok akuntansi sektor publik.⁸

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan,

⁸Abdul Halim, *Akuntansi keuangan daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 143.

mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Dari definisi tersebut ada beberapa istilah pokok yang perlu diperhatikan:

1. seragam melalui prosedur atau urutan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu aturan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk menangani transaksi yang terjadi berulang-ulang.
2. Identifikasi. Melalui proses akuntansi kejadian-kejadian ekonomi dikenali karakteristiknya dan dikenali pengaruhnya terhadap kekayaan, utang, dan modal, serta pendapatan dan biaya.
3. Mencatat atau mererekam. Berdasarkan hasil identifikasi atas peristiwa ekonomi yang sudah terjadi selanjutnya dilakukan pencatatan untuk merekam transaksi tersebut dalam sistem yang sudah disediakan.
4. Menafsirkan. Jika transaksi ekonomi sudah dicatat, dan sudah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan, maka secara sistematis akumulasi atau kumpulan tiap kelompok transaksi dapat memberikan makna untuk ditafsirkan.
5. Komunikasi. Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan rincian dan jumlah kekayaan, utang, modal pada akhir periode akuntansi. Selain itu, proses akuntansi juga menghasilkan laporan tentang jumlah pendapatan, biaya dan laba selama satu periode akuntansi.
6. Peristiwa ekonomi. Yang dimaksud dengan peristiwa ekonomi adalah setiap kejadian yang mengaruhi kekayaan, utang, modal, pendapatan, atau biaya perusahaan. Dalam ilmu akuntansi peristiwa ekonomi ini sering dikenal dengan istilah transaksi.
7. Organisasi. Yang termasuk dalam kategori organisasi adalah perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi lain yang sehari-harinya mengelola keuangan. Namun, selain organisasi formal, individu

perorangan dapat saja mengorganisasi kegiatannya dan kemudian menyelenggarakan akuntansi untuk mengomunikasikan informasi keuangannya dengan pihak lain.⁹

Akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan dua aspek penting.

1. Penekanan pada aspek fungsi, yaitu pada penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan aspek fungsi akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi. Informasi tersebut penting untuk perencanaan yang efektif, pengawasan dan pembuatan keputusan oleh manajemen serta memberikan pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor, pemerintah, dan lainnya.
2. Penekanan pada aspek aktivitas dari orang yang melaksanakan proses akuntansi. Dalam aspek ini, orang yang melaksanakan proses akuntansi harus:
 - a. Mengidentifikasi data yang relevan dalam pembuatan keputusan;
 - b. Memproses atau menganalisa data relevan;
 - c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Oleh karena itu, akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengelolaan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Pengertian akuntansi juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sudut pandang pemakai jasa akuntansi, yaitu bahwa akuntansi adalah “Suatu disiplin yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

⁹ Samryn, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

- a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen,
- b. Pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya.

Akuntansi secara teknis diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*) mengartikan akuntansi sebagai suatu seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya.¹⁰

F. Prinsip Akuntansi

1. Pengertian Prinsip Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memberikan pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.¹¹

Jika manajemen suatu perusahaan dapat mencatat dan melaporkan data keuangan yang dirasa sesuai untuk mereka, maka perbandingan laporan keuangan antarperusahaan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, akuntan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai **prinsip akuntansi berterima Umum (PABU)** yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *generally accepted accounting principles (GAAP)*. Sebagai buku akuntansi menggunakan

¹⁰ Mursyidi, *Akuntansi dasar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 18.

¹¹ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104.

istilah **prinsip akuntansi yang berlaku umum, prinsip akuntansi yang diterima umum umum, atau prinsip akuntansi lazim**. PABU memungkinkan investor dan para pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan antarperusahaan.¹²

Profesi akuntansi telah menciptakan seperangkat standar dan aturan yang diakui secara umum sebagai pedoman dalam pelaporan akuntansi, yang dinamakan prinsip akuntansi yang berterima secara umum (*general accepted accounting principles, GAAP*)¹³

2. Penggolongan Prinsip Akuntansi

Terdapat beberapa prinsip-prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Kontinuitas usaha (*going concern*) adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang
2. Kesatuan usaha (*business entity*). Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya
3. Periode akuntansi (*Accounting periode*), adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan.
4. Kesatuan pengukuran (*measurent unit*). Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan berdiri)
5. Bukti yang objektif (*objektif evidence*) informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada

¹² James, M. Reeve, et, al. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2009), h. 13.

¹³ Wibowo, (ed.) *Pengantar akuntansi II*, (Palmerah Selata: PT Grasindo, 2004), h.20.

6. Pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure*). Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai
7. Konsistensi (*consistency*). Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan
8. Realisasi (*matching expense with revenue*). Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba -rugi periode berjalan.¹⁴

G. Akuntabilitas

1. Sekilas Tentang Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah . Oleh karena dana atau uang yang dikelola oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah di era reformasi termasuk reformasi keuangan daerah yang merupakan era yang lebih demokratis dan terbuka kepada rakyat menjadi relatif lebih besar, maka masyarakat lebih tertarik dan merasa ikut mengawasi berjalannya sistem akuntabilitas keuangan.¹⁵

2. Akuntabilitas Pada Organisasi Keagamaan

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan

¹⁴ Syaiful bahri, pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, penerbit ANDI, yogyakarta 2016, hal.3

¹⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salembah Empat, 2002), h. 146.

untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba. Namun demikian, dalam prakteknya organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.¹⁶

3. Karakteristik Dan Lingkungan Organisasi Keagamaan

Karakteristik organisasi keagamaan dapat dikupas melalui arti “organisasi keagamaan” secara etimologi, “organisasi keagamaan” dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. “Organisasi keagamaan” dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura atau organisasi di luar organisasi keagamaan namun bergerak dalam bidang keagamaan. Dari segi penyelenggaraannya, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tersebut.

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Kristen, Katolik, Budha, Hindu? Pertanyaan ini begitu menggelitik, karena agama sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan, hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan, prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang didasarkan pada syariah Islam) atau akuntansi Kristen atau akuntansi Hindu dan lainnya wajar saja dipertanyakan.

Jika seorang mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam, misalnya, dalam Al-Quran, maka dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits, Islam juga membahas ilmu akuntansi.

¹⁶*Ibid*, h. 219.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tataran makro maupun mikro. Ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit” perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya, yaitu “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial ekonomi umat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tatanan normatif saja. Islam dan agama lainnya merupakan agama amal, sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual.

Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama, sistem pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Menilik dari apa yang timbul pada organisasi keagamaan, organisasi pada lembaga peribadatan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh gerak dan orientasi organisasi pada organisasi keagamaan seirama dengan organisasi yang berjenis nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya.¹⁷

Seperti organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi keagamaan juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut telah menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik,

¹⁷ Bastian Indra, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 216.

termasuk lembaga atau organisasi di lingkup organisasi keagamaan. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana sekalipun.

Akuntansi yang diterapkan pada organisasi keagamaan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik yang dimaksud adalah para anggota, umat, atau pengikut agama di organisasi keagamaan bersangkutan.

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi keagamaan yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang *profit-oriented* dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya.

Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Dilihat dari tujuannya, organisasi keagamaan tidak bertujuan memperoleh laba, tidak seperti organisasi swasta yang *profit-oriented*. Tujuan organisasi keagamaan adalah memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang membutuhkan maupun yang telah menjadi ritual dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun tidak berarti organisasi keagamaan sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini tergantung pula pada kondisi umat yang dilayani. Misalnya, apabila terjadi perkembangan umat secara kuantitas, maka kebutuhan akan daya dukung untuk pelayanan itu pun otomatis turut berkembang. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pelayanan. Tujuan keuangan organisasi keagamaan ini berbeda secara filosofis, konseptual, dan operasional dengan organisasi profit swasta.

Dari segi sumber pendanaan atau lebih konkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, organisasi keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama.

Adapun dalam konteks pola pertanggungjawaban, jika organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik usaha dan kreditor, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

Secara kelembagaan, organisasi keagamaan juga berbeda dengan organisasi lainnya, termasuk organisasi publik. Struktur organisasi ini tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang tokoh ataupun pihak yang disegani. Pihak yang berpengaruh ini biasanya kemungkinan besar akan mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya akan sangat berpengaruh dalam memilih struktur organisasi.¹⁸

Apabila dilihat dari karakteristiknya, anggaran organisasi keagamaan sangat bersifat terbuka: bahkan umat dapat melihatnya sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini terjadi karena anggaran berasal dari umat dan perkembangan organisasi keagamaan tersebut, pada umumnya, merupakan tanggung jawab umat secara kolektif.

H. Laporan Keuangan Masjid

1. Pengertian Laporan Keuangan

Suatu lembaga/organisasi/perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan mencatat transaksi keuangan secara sistematis. Pencatatan yang dilakukan akan diringkas menjadi suatu laporan keuangan. Laporan ini dapat dibuat setiap saat, di mana pihak-pihak yang terkait menginginkannya, dapat dibuat dalam bulanan, triwulan, semesteran dan satu tahun atau satu periode akuntansi sesuai dengan kebijakan perusahaan.¹⁹

¹⁸*Ibid*, h. 217.

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi dasar* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h. 121

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan pengembangan dibutuhkan adanya program monitoring dan evaluasi dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring dan evaluasi, maka dipandang perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan atau acuan bagi semua masjid dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan. Untuk menjalankan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan masjid maka diperlukan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi.

Kegiatan pencatatan dan pengolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang – ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu.

Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan seperti yang dijumpai pada masjid-masjid kecil, dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis seperti dijumpai pada masjid-masjid besar. Perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin-mesin pembukuan dan komputer untuk mengelola data akuntansi semakin banyak digunakan baik dalam masjid besar maupun menengah.

Metode pencatatan akuntansi mana yang akan digunakan dalam suatu organisasi, apakah metode tulis tangan, mekanik atau elektronik tergantung pada berbagai faktor. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan antara lain besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan jumlah yang biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian setiap metode tersebut. Masjid kecil mungkin akan menganggap biaya pemakaian komputer elektronik terlalu mahal,

sebaliknya dalam masjid besar penggunaan metode tulis tangan dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan sangat banyak jumlahnya. Namun demikian tanpa memandang metode pencatatan akuntansi mana yang digunakan, semua metode tersebut sama-sama membutuhkan adanya konsep-konsep dasar akuntansi.²⁰

I. Komponen Laporan Keuangan Masjid

Komponen laporan keuangan pada umumnya memiliki perbedaan dengan laporan keuangan yang berlaku pada masjid. Komponen laporan keuangan pada masjid terdiri dari empat, yaitu:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa asset, kewajiban dan net asset pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu.

Contoh:

²⁰ Mhd.Syahman Sitompul, et, al, *Akuntansi Masjid* (Febi UIN-SU Press.2015), h. 63.

Mesjid XXX
 Neraca
 Per 31 Desember 20xx
 (dalam rupiah)

Uraian		Catatan	31/12/20XX	31/12/20XX
Aset				
Aset Lancar				
	Kas		XXX	XXX
	Persediaan		XXX	XXX
		Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Aset Tetap				
	Tanah		XXX	XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX	XXX
	Gedung dan Bangunan		XXX	XXX
	Peralatan dan Mesin-TP		XXX	XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX	XXX
	Akumulasi Penyusutan		XXX	
		Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
Jumlah Aset			XXX	XXX
Kewajiban				
Jumlah Kewajiban				
Aset Netto				
Aset Netto Lancar			XXX	
	Surplus (Defisit)		XXX	XXX
	Aset Netto		XXX	XXX
	Aset Netto-TP		XXX	XXX
	Jumlah Aset Netto Lancar			
Jumlah Aset Netto			XXX	XXX

Gambar 2.2 contoh neraca (laporan posisi keuangan)

2. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung.

Contoh:

Masjid XXX
 Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31
 Desember 20xx
 (dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des20xx	31 Des 20xx
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Zakat		xxx	xxx
Infaq		xxx	xxx
Sadaqah		xxx	xxx
Wakaf		xxx	xxx
Jumlah Pendapatan		xxx	xxx
Beban			
Beban Gaji Pegawai		xxx	xxx
Beban Barang		xxx	xxx
Beban Pemeliharaan		xxx	xxx
Beban Jasa		xxx	
Beban Penyusutan		xxx	xxx
Jumlah Beban		xxx	xxx
Surplus (Defisit) LO		xxx	xxx

Gambar 2.3 Contoh laporan operasional

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu masjid selama periode tertentu.

Contoh:

Masjid XXX
 Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
 Desember 20xx
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Des 20xx	31 Des 20xx
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		

I. Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Zakat	xxx	xxx
	Pendapatan Infaq	xxx	xxx
	Pendapatan Sadaqah		
	Pendapatan Wakaf	xxx	xxx
	Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	xxx	xxx
II. Arus Kas Keluar			
	Beban Gaji Pegawai	xxx	xxx
	Beban Jasa	xxx	xxx
	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx
	Beban Barang Lainnya	xxx	xxx
	Beban Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional (A.I.A.II)	xxx	xxx
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
I. Arus Kas Masuk			
	Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		
II. Arus Kas Keluar			
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I.B.II)		
C. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
I. Arus Kas Masuk			
	Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		
II. Arus Kas Keluar (C.II)			
	Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		
	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan (C.C.II)		
	Kenaikan (Penurunan) Kas	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas		xxx	xxx

Gambar 2.4 Contoh Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan Keuangan(CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.²¹

Contoh:

Catatan Atas Laporan Keuangan

a. PENJELASAN UMU

- 1) DASAR HUKUM
- 2) VISI DAN MISI MASJID XXX

VISI

.....
.....

MISI

1.
.....
2.
.....
3.
.....

3) PEDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pelaporan Keuangan Masjid yang menekankan kepada aspek-aspek transparansi, kemadirian, akuntabilitas, dan responsibilitas dan kewajaran.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menggabungkan dua peraturan yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor... Tahun ... tentang, yang menghasilkan susunan organisasi Masjid seperti berikut:

- a) Dewan Pengawasan
- b) Dewan Penyantun

²¹ *Ibid*, h.68.

- c) Senat
- d) Pimpinan BLU (Rektor dan Wakil Rektor)
- e) Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
- f) Pejabat Keuangan BLU (Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan)
- g) Pejabat Teknis:
 - (1) Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan
 - (2) Kepala Bagian Umum
 - (3) Kepala Bagian Perencanaan
 - (4) Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
 - (5) Kepala Bagian Organisasi, Kepagawaian dan Hukum
 - (6) Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - (7) Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
 - (8) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
 - (9) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum IAIN Sumatera Utara Tahun 2013 (Audit) mencakup seluruh aspek keuangan termasuk keuangan yang dikelola oleh Unit organisasi di lingkungan IAIN Sumatera Utara.

4) KEBIJAKAN AKUNTANSI

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Badan Layanan Umum IAIN Sumatera Utara adalah basis akrual. Basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan oleh entitas yang bersangkutan.

b) Periode Pelaporan

Periode penyajian Laporan Keuangan berdasarkan tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) untuk tahun anggaran 2013 dimulai dari 1 Januari 2013 samapi dengan 31 Desember 2013

c) Mata Uang Transaksi dan Pelaporan

Mata uang pelaporan menggunakan mata uang Rupiah. Trnsaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs BI pada tanggal terjadinya transksi.

Aset dan Kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang IDR dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Selisih Kurs yang terjadi diakui sebagai pendapatan atau beban pada pelaporan aktivitas penyelenggaraan BLU.

d) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh IAIN Sumatera Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

e) Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan setara kas lainnya yang akan kembali menjadi kas dengan cara menjual, mengaih, atau habis pakai dalam operasional entitas yang bersangkutan dalam satu periode akuntansi

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasi, dipakai, dan/atau

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

(1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

(2) Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk

- Dijual dalam kegiatan usaha normal
- Digunakan dalam proses produksi
- Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

f) Aset Tetap

Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Aset tetap meliputi:

- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Peralatan dan Mesin TP.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan mamfaat dari seluruh aset tetap, kecuali tanah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberlakuan akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

(1) Nilai yang dapat disusutkan

Nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap, dialokasikan secara sistematis sepanjang masa mamfaatnya

(2) Metode Penyusutan

Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemamfaatan ekonomi suatu aset oleh BLU

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus

(3) Masa Mamfaat

Masa mamfaat setiap aset tetap ditelaah secara berulang dan periodik. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, baiya penyusutan utuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan

h) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residu BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki

Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen

(1) Ekuitas terikat Permanen

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur. Ekuitas terikat permanen meliputi:

- Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual
- Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen
- Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen

i) Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari mamfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:

(1) Pendapatan Hibah

Merupakan pedapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah terikat adalah hibah yang peruntukan ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah

(2) Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal

(3) Pendapatan Usaha lainnya

Merupaka pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lemabaga keuangan,

dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU

(4) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar

(5) Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang dan di luar kendali BLU

j) Beban

Beban adalah penurunan mamfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih

Biaya BLU diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Beban Pegawai

Beban merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai. Beban ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Honorarium/Lembur/ Vakasi Khusus, dan Beban Kontribusi Sosial

(2) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa serta beban perjalanan. Beban ini antara lain meliputi beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban barang BLU.

(3) Beban Hibah

Beban Hibah adalah pengeluaran dalam bentuk uang/baran atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, organisasi dan kelompok masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

(4) **Beban Lain-lain/Tidak Terduga**

Beban hibah adalah pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas seperti pengagulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan BLU.²²

J. Unsur –Unsur Laporan Keuangan Masjid

Sama halnya dengan laporan keuangan akuntansi umum, laporan keuangan masjid memiliki 5 (lima) unsur laporan keuangan, yaitu:

1. Aset

Aset yaitu sumber daya dikuasai sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari keuntungan ekonomi di masa depan diharapkan mengalir pada entitas.

Aset terdiri dari 2 sub-bagian, yaitu aset lancar (seperti kas, persediaan, dll) dan Aset tetap (seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dll). Pada aset tetap, terdiri:

a) **Aset Tetap Tidak Terikat**

Aset tetap tidak terikat yaitu aset yang nilai manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun

b) **Aset Tetap Terikat**

- Aset tetap terikat sementara, yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas dalam jangka

²²*ibid.* h.135

waktu yang disepakati, dan akan dikembalikan saat jatuh tempo.

- Aset tetap terikat permanen, yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas secara permanen.

2. Kewajiban

Kewajiban yaitu kewajiban masalah yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya/jasa.

3. Net Aset (Ekuitas)

Net aset atau yang disebut ekuitas merupakan sisa hak atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban

4. Pendapatan

Pendapatan merupakan meningkatkan mamfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekatkan dari suatu aset dan meningkan nilai net aset yang menjadi partisipasi hak.

a) Jenis-Jenis Pendapatan

Mesjid merupakan wadah yang bertindak sebagai subjek dan objek hukum, oleh karena itu, masjid harus mempunyai pendapatan agar dapat membiayai kegiatan operasional dan kelangsungan hidupnya. Masjid sebagai entitas publik tempat kegiatan beribadah umat Islam, yang menjadi sumber pendapatannya adalah partisipasi dan sumbangan masyarakat serta kelebihan dana dari kegiatan yang diadakan pengurus masjid. Lazimnya pendapatan entitas masjid berasal dari pendapatan zakat, pendapatan infaq, pendapatan sodaqah, dan pendapatan wakaf.

b) Pendapatan Zakat

Zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seseorang yang membayar zakat karena keimannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak.

Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta dan penyaluran zakat yang tidak keluar dari asnaf. Dimana penyalurannya dapat diprioritaskan sesuai dengan realitas keberadaan mustahik.

1) Pendapatan Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Infaq tidak mengenal nisaf, boleh diberikan kepada siapapun.

Pendapatan infaq adalah pendapatan masjid atas jasa yang diberikan masjid. Pendapatan infaq bersumber dari penyewaan aula masjid, ambulance dan parkir. Pinjaman qard bagi masyarakat dan pendapatan lain atas kegiatan usaha masjid.

2) Pendapatan Sodaqah

Sodaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, shadaqah berarti menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat baik dari segi jumlah, waktu dan kadarnya.

Pendapatan sodaqah bersumber dari pemberian jamaah dan masyarakat lewat kotak amal, sumbangan rutin.

3) Pendapatan Wakaf

Wakaf berasal dari kata wafqu berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi syariah, wakaf berarti menahan, mengekang atau menghentikan harta dan memberikan mamfaat di jalan Allah untuk memindahkan milik pribadi menjadi suatu

badan atau yayasan yang memberikan mamfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan ridha Allah swt

Pendapatan wakaf bersumber dari wakaf berupa aset tetap seperti gedung, tanah, kendaraan. Maupun wakaf tidak tetap berupa wakaf produktif, wakaf uang

Untuk mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan zakat perlu dicatat dan dibukukan serta dilaporkan sesuai kaidah akuntansi yang merupakan turunan dari Al-Baqarah;282.²³

5. Beban

Beban merupakan penurunan mamfaat akonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dengan membentuk arus keluar/ddepresiasi aset dan menurunnya nilai net aset yang menjadi pertisipasi lainnya dalam operasional perusahaan.²⁴

a. Jenis-Jenis Beban

Sebagai subjek dan objek hukum, dimana untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mesjid memiliki pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran dalam suatu kegiatan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban lain-lain/tidak terduga, beban murni akrual, dan beban transfer.

Lazimnya, pengeluaran masjid mencakup beban pegawai, beban barang, beban jasa, dan beban pemeliharaan.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang dan barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai yang bertugas secara terus menerus mengurus masjid selama periode akuntansi

2) Beban Barang

²³ *Ibid*, h. 71

²⁴ *Ibid*, h. 68.

Beban barang adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk membeli barang keperluan sehari-hari untuk kegiatan operasional masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam masjid.

3) Beban Jasa

Beban jasa adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan dalam bentuk jasa untuk kegiatan operasional masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam masjid

4) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk mempertahankan keutuhan aset yang dimiliki sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam masjid.²⁵

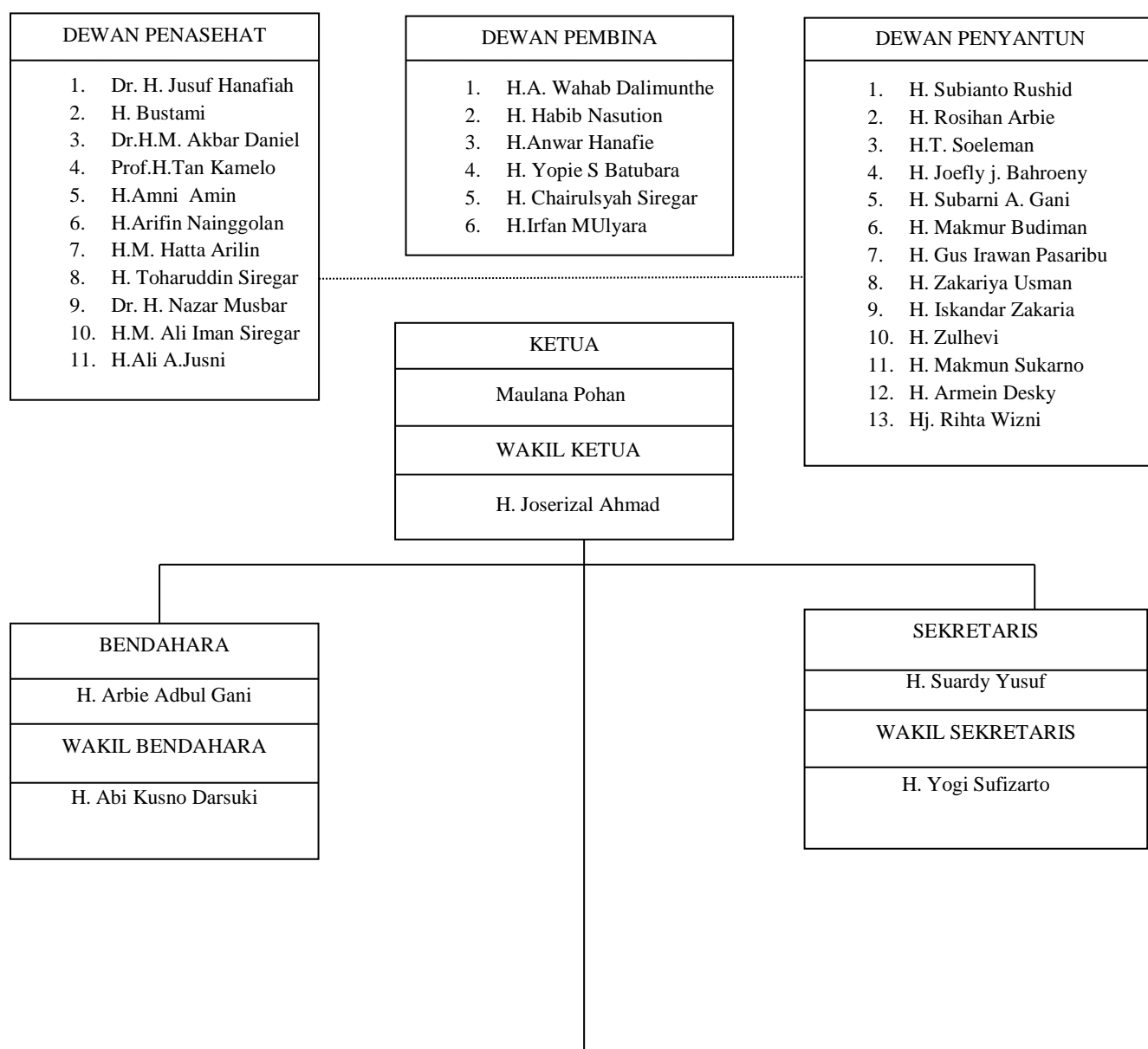
²⁵ *Ibid.* h.85

BAB III
LAPORAN KEUANGAN MASJID

A. Gambaran Umum Masjid Al-Musabbihin

Ikatan Keluarga Muslim Taman Setia Budi Indah (IKMT) didirikan sesuai Anggaran Dasar No. 47 tanggal 10 November 1987 yang telah diaktakan Akta Nomor 39 Tanggal 1992 oleh Notaris Djaidir, SH. Yayasan Wakaf Keluarga Muslim Tasbih berkedudukan di Taman Setia Budi Indah Blok C No. 100 Medan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN I.K.M.T. 2004-2017



BIDANG KENAZIRAN H. Rizal Yacob H. Irsan Rangkuti	BIDANG PEMBANGUNAN Ir.H.Soekardi H.T. Ayoeb Yoezar	BIDANG SOSIAL H. Soemardi KH H. Yose Rizal Nasution	BIDANG USAHA H. Armien R Jusuf H.M. Arsyad	BIDANG PENDIDIKAN H. Usman Ismail H.Syamsl Adhar
--	---	---	---	---

1. Laporan Keuangan Masjid Al-Musabbihin

IKATAN KELUARGA MUSLIM TAMAN SETIABUDI INDAH
Lapooran Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2016 dan Desember 2015
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31/12/2016	31/12/2015
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3	361.441.274	715.841.216
Piutang Lain-lain	4	17.463.378	17.463.378
Jumlah Aset Lancar		<u>378.904.652</u>	<u>733.304.594</u>
Aset Tetap			
Aset Bergerak			
Harga Perolehan	5	970.961.599	877.371.299
Akumulasi Penyusutan		(755.578.824)	(641.991.137)
Nilai Buku		<u>215.382.775</u>	<u>235.380.162</u>
Aset Tidak Bergerak			
Harga Perolehan	6	6.679.616.101	4.166.871.580
Akumulasi Penyusutan		(1.072.269.341)	(884.666.622)
Nilai Buku		<u>5.607.346.760</u>	<u>3.282.204.958</u>
Jumlah Aset Tetap		<u>6.201.634.187</u>	<u>4.250.889.714</u>
Jumlah Aset			
Kewajiban dan Aset Bersih			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			

	Kewajiban Jangka Panjang	7	1.928.880.166	-
	Jumlah Kewajiban		<u>1.928.880.166</u>	
	Aset Bersih			
	Aset Bersih Tidak Terikat	8	3.926.129.813	3.791.739.860
	Kenaikan Aset Bersih Tidak Terikat	9	346.124.209	459.149.855
	Jumlah Aset Bersih		<u>4.272.254.022</u>	<u>4.250.889.715</u>
			-	-
	Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih		<u>6.201.134.188</u>	<u>4.250.889.715</u>

Gambar 3.1 Laporan Posisi Keuangan Masjid Al-Musabbihin

IKATAN KELUARGA MUSLIM TAMAN SETIABUDI INDAH
Laporan Laba rugi
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015
(dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	31/12/2016	31/12/2015
Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat				
Pendapatan dan Penghasilan				
	Pengembangan	10.1		
	Dana Ramadan	10.2	223.077.000	
	Iuran STM (IKMT)	10.3	38.410.000	66.465.000
	Infaq	10.4	1.627.450.000	1.639.720.620
	Wakaf	10.5	31.110.000	39.440.000
	Baziz	10.6	32.688.000	24.500.000
	Desa Binaan	10.7	62.374.000	4.500.000
	Dana Dakwa Lapas	10.8		500.000
	Dana Haji	10.9	16.500.000	39.250.000
	Penerimaan Lain-lain	10.10		3.079.891
	Jumlah Pendapatan dan Penghasilan		<u>2.031.609.000</u>	<u>1.817.455.511</u>
Beban dan Kerugian				
	Biaya gaji/honor guru dan pegawai	10.11	48.760.000	28.500.000
	Biaya honor ustadz dan kenaziran	10.12	374.500.000	323.500.000
	Biaya cetak fotocopy	10.13	19.100.900	13.423.850

	Biaya Konsumsi	10.14	124.122.000	61.486.050
	Bantuan Duafa, Sumbangan dan Rutin Desa Binaan	10.15	119.547.000	61.115.000
	Biaya Pemeliharaan Aset Tetap	10.16	154.330.150	83.513.450
	Biaya Keperluan Masjid	10.17	60.752.950	58.596.200
	Biaya Listrik, Air dan telepon	10.18	92.055.385	63.028.600
	Biaya Perayaan Hari Besar Islam	10.19	170.612.000	153.788.000
	Biaya Baju Seragam Kenaziran	10.20	1.904.000	9.190.000
	Biaya Transportasi	10.21	6.275.000	4.235.000
	Biaya Ceramah	10.22	116.900.000	104.800.000
	Biaya Asuransi	10.23	5.418.000	5.418.000
	Biaya Keamanan	10.24	5.550.000	4.950.000
	Biaya Keperluan Jenazah dan Santunan Bilal	10.25	50.655.000	42.095.000
	Biaya Lain-lain	10.26	3.200.000	27.480.000
	Biaya Operasional Haji	10.27	30.112.000	24.600.000
	Biaya Dakwa di Lapas	10.28		
	Beban Penyusutan	10.29	301.690.407	288.586.507
	Jumlah Beban dan Kerugian		<u>1.685.484.792</u>	<u>1.358.305.657</u>
	Perubahan Kenaikan Aset Bersih Tidak Terikat		<u>346.124.209</u>	<u>459.149.855</u>
			-	-
	Aset Bersih Awal Tahun		<u>4.250.889.715</u>	<u>3.791.739.860</u>
	Pengurangan		-	-
	Penyesuaian Atas Aset Bersih	10.30	<u>(324.759.902)</u>	-
			-	-
	Aset Bersih Akhir Tahun		<u>4.272.254.022</u>	<u>4.250.889.715</u>

Gambar 3.2 Laporan Laba Rugi Masjid Al-Musabbihin

IKATAN KELUARGA MUSLIM TAMAN SETIABUDI INDAH
Laporan Arus Kas
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015
(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2016	31/12/2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
Kas diterima dari Pendapatan		
Pengembangan		
Dana Ramadan	223.077.000	
Iuran STM (IKMT)	38.410.000	66.465.000
Infaq	1.627.450.000	1.639.720.620
Wakaf	31.110.000	39.440.000
Baziz	32.688.000	24.500.000
Desa Binaan	62.374.000	4.500.000
Dana Dakwa Lapas		500.000
Dana Haji	16.500.000	39.250.000
Penerimaan Lain-lain		3.079.891
Jumlah Kas diterima dari Pendapatan	<u>2.031.609.000</u>	<u>1.817.455.511</u>
Kas yang dibayar untuk		
Beban Operasional dan Kerugian	(1.708.554.287)	(1.069.719.150)
Kewajiban Jangka Panjang		
Piutang Lain-lain		
Jumlah Kas yang diterima untuk aktivitas operasional	<u>(1.708.554.287)</u>	<u>(1.069.719.150)</u>
Kas Bersih yang diterima Untuk Operasional	<u>323.054.713</u>	<u>747.736.361</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

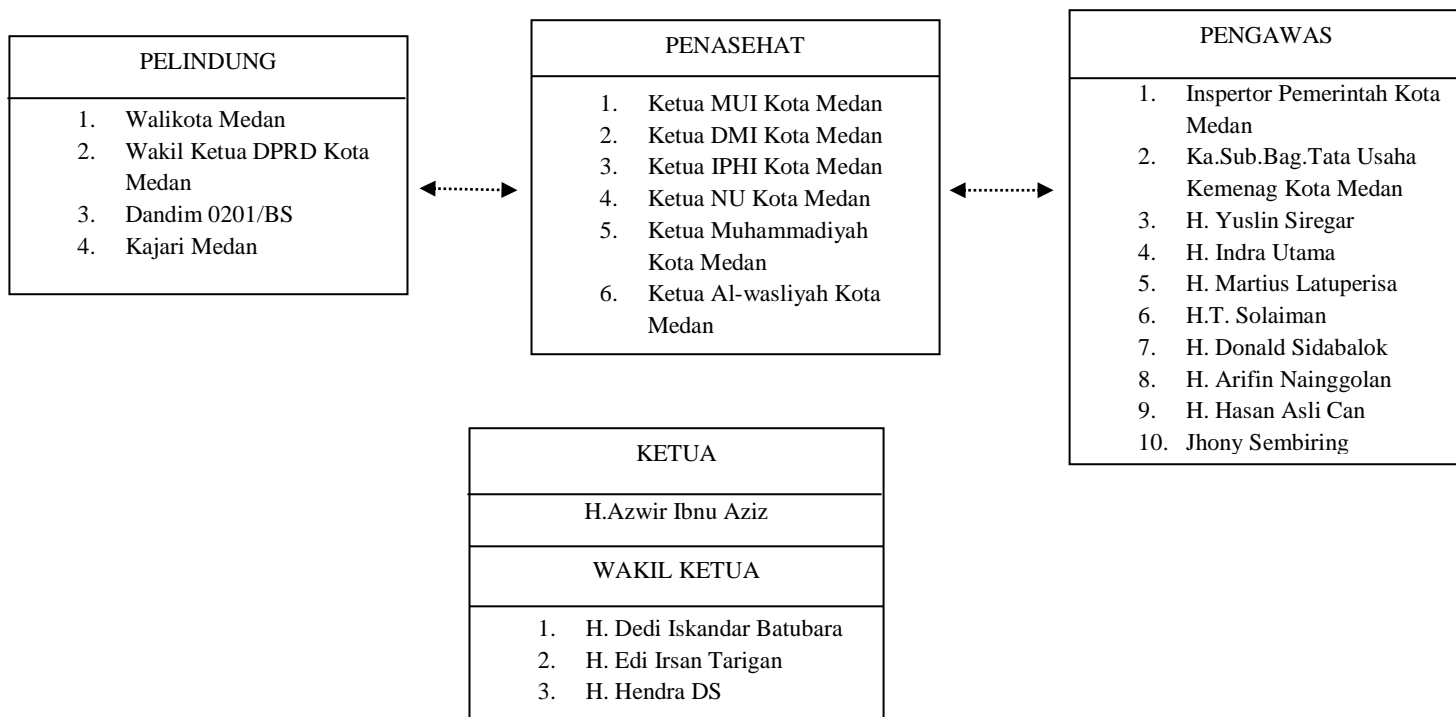
	Pembelian Aset tetap Bergerak tahun 2016	(93.590.300)	(212.479.750)
	Pembelian Aset Tetap Tidak Bergerak Tahun 2016	(583.864.355)	(140.533.000)
	Kas Bersih yang diterima untuk Aktivitas Investasi	(677.454.655)	(353.012.750)
	Kas Bersih yang diterima untuk aktivitas pendanaan		
	Kenaikan/penurunan Kas dan Setara Kas	(354.399.942)	394.723.611
	Kas dan Setara Kas Pada Awal tahun	715.841.216	321.117.605
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir tahun	361.441.274	715.841.216

Gambar 3.3 Laporan Arus Kas Masjid Al-Musabbihin

B. Gambaran Umum Masjid Agung Medan

Kenaziran dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Agung Medan berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Pengeran Diponegoro No. 26, Kecamatan Medan Polonia Kelurahan Madrasa Hulu.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AGUNG MEDAN



	<p>BENDAHARA</p> <p>Ir. H. Mahmuzar Nasution</p> <p>WAKIL SEKRETARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Darwin 2. H. Darma Husnaldi 3. H. Salim Matondang 4. Datuk Adil F. Haberham 5. Ir.H. Zikriman Mudaraksa 6. Bonggal Ritonga
--	--

1. Laporan Keuangan Masjid Agung Medan

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID AGUNG

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2015

(dalam Ruipiah)

Uraian	Catatan	2015
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	C.1	<u>587.799.182</u>
Jumlah Aset Lancar		587.799.182
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan	C.2	<u>10.699.375</u>
Jumlah Aset		<u>598.498.557</u>
LIABILITAS		
SALDO DANA		
Dana Infaq dan Sedekah	C.3	<u>598.498.557</u>
Jumlah Dana		

		<u>598.498.557</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>598.498.557</u>

Gambar 3.4 Laporan Posisi Keuangan Masjid Agung Medan

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID AGUNG

Laporan Perubahan Dana

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015

(dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	2015
Dana Infaq, Sedekah dan Lainnya			
Penerimaan Dana			
	Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	D-1.a	1.223.970.000
	Penerimaan Parkir	D-1.b	111.195.000
	Penerimaan Dana Pemakaian Masjid	D-1.c	31.950.000
	Pendapatan Bagi Hasil	D-1.d	<u>1.802.411</u>
	Jumlah		<u>1.368.917.411</u>
Pengeluaran dan Beban			
	Beban Gaji/Honor	D-2.a	549.960.000
	Beban Kegiatan Masjid	D-2.b	68.263.900
	Beban Pemeliharaan Sarana Masjid	D-2.c	50.482.000
	Beban Utilitas	D-2.d	45.945.492
	Beban Rumah Tangga	D-2.e	17.826.000
	Beban Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	D-2.f	10.743.000
	Beban Konsumsi	D-2.g	10.670.000
	Beban Publikasi	D-2.h	7.100.000
	Beban Sewa	D-2.i	3.500.000
	Beban Penyusutan Aset Tetap	D-2.j	1.130.625
	Beban Administrasi Bank	D-2.k	

			897.837
	Beban Transportasi	D-2.I	400.000
	Beban Lainnya	D-2.m	3.500.000
	Jumlah Pengeluaran		770.418.850
	Surplus (defisit)		598.498.557
	Saldo Awal		
	Saldo Akhir	C.3	598.498.557

Gambar 3.5 Laporan Arus Kas Masjid Agung Medan

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID AGUNG

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015

(dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas diterima dari			
	Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah		1.223.970.000
	Penerimaan Parkir		111.195.000
	penerimaan Dana Pemakaian Masjid		31.950.000
	Pendapatan Bagi Hasil		<u>1.802.411</u>
	Jumlah Penerimaan kas dari aktivitas operasi		1.368.917.411
Pengeluaran Kas untuk			
	Kegiatan Operasional		(769.288.229)
	Pembayaran dimuka		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (a)		<u>599.629.182</u>

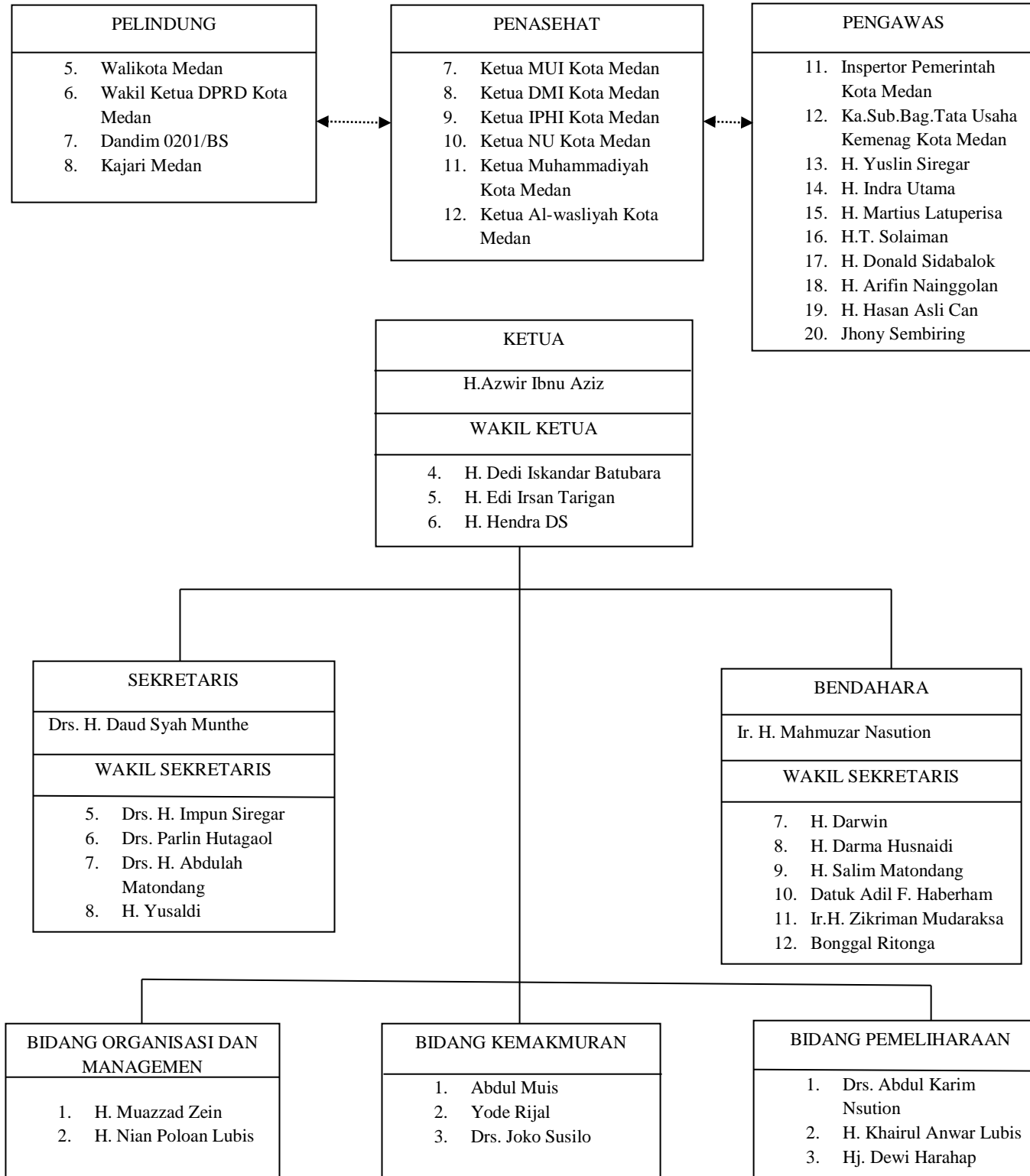
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
	Pembelian/Penambahan Aset Tetap		(11.830.000)
Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi (b)			(11.830.000)
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan ©			
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara kas (d)=a-b-c			587.799.182
Kas dan Setara Kas Awal Tahun (e)			
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (f)=d+e		C-1	<u>587.799.182</u>

Gambar 3.6 Laporan Arus Kas

C. Gambaran Umum Masjid Al-Jihad

Masjid Al-Jihad yang berada di Jl. Abdullah Lubis No.55 Medan masjid ini berasal berdiri dalam bentuk yayasan.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AL-JIHAD



**Laporan Keuangan Masjid Al-Jihad
YAYASAN MASJID AL-JIHAD MEDAN BARU**

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam Rupiah)

Gambar 3.7 Laporan Posisi Keuangan Masjid Al-Jihad Medan

Uraian	Catatan	2015	2014
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	C-1	1.007.728.676	1.151.532.744
Pembiayaan Dimuka	C-2	<u>141.560.000</u>	<u>9.000.000</u>
Jumlah Aset Lancar		<u>1.149.288.676</u>	<u>1.160.532.744</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan	C-3	<u>18.162.286.912</u>	<u>17.942.085.105</u>
Jumlah Aset		<u>19.311.575.588</u>	<u>19.102.617.849</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
SALDO DANA			
Dana Zakat	C-4	163.767.175	155.015.925
Dana Infaq dan Sedekah	C-5	1.703.567.286	1.503.360.797
Dana Kumulatif Periode Lalu	C-6	<u>17.444.241.127</u>	<u>17.444.241.127</u>
Jumlah Dana		<u>19.311.575.588</u>	<u>19.102.617.849</u>
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		<u>19.311.575.588</u>	<u>19.102.617.849</u>

YAYASAN MASJID AL-JIHAD MEDAN BARU

Laporan Perubahan Dana

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	2015	2014
DANA ZAKAT				
Penerimaan				
	Penerimaan Dana Zakat	D-1	378.543.000	383.441.000
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat		378.543.000	383.441.000
Pengeluaran				
	Adminitrasi/Perlengkapan/Konsumsi	D-2	(368.050.000)	(15.000.000)
	Jumlah Pengeluaran		(368.050.000)	(15.000.000)
Penyaluran				
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	D-3	(368.050.000)	(326.550.000)
Surplus (Defisit)			8.751.250	41.891.000
Saldo Awal			144.015.925	113.124.925
Saldo Akhir			163.767.175	155.015.925
Dana Infaq, Sedekah Dan Lainnya				
Penerimaan Dana				
	Penerimaan Dana Tabungan Infaq	D-4.1.1	1.012.439.000	935.616.800
	Penerimaan Dana Pembangunan	D-4.1.2	383.085.000	302.308.000
	Penerimaan Dana Ramadhan	D-4.1.3	276.442.000	261.225.800
	Penerimaan Parkir	D-4.1.4	27.076.000	28.692.000
	Pendapatan Bagi Hasil	D-4.1.5	6.715.610	7.356.053

	Jumlah		<u>1.705.757.610</u>	<u>1.535.198.653</u>
	Pengeluaran dan Beban			
	Biaya Gaji/Honor	D-4.2.1	737.379.500	492.576.000
	Beban Penyusutan Aset tetap	D-4.2.2	215.828.257	154.962.583
	Beban Rumah Tangga	D-4.2.3	146.032.654	157.485.200
	Beban Listrik, Air dan Telepon	D-4.2.4	120.062.250	60.810.967
	Biaya Perlengkapan dan ATK	D-4.2.5	41.635.350	41.099.160
	Biaya Pemeliharaan Sarana Masjid	D-4.2.6	86.013.080	48.274.500
	Biaya Kegiatan Masjid	D-4.2.7	59.343.166	73.613.804
	Biaya Asuransi	D-4.2.8	22.780.853	
	Biaya Sewa	D-4.2.9	17.600.000	14.000.000
	Biaya Cetak dan Fotocopy	D-4.2.10	3.206.700	2.614.000
	Biaya Transportasi	D-4.2.11	1.419.000	350.000
	Biaya Pajak	D-4.2.12	783.811	819.599
	Biaya Adminitrasi	D-4.2.13	427.000	541.000
	Biaya Lain –Lain	D-4.2.14	<u>53.039.500</u>	<u>35.922.000</u>
	jumlah pengeluaran		<u>1.505.551.121</u>	<u>1.083.068.813</u>
	Surplus (Defisit)		<u>200.206.489</u>	<u>452.129.840</u>
	Saldo Awal		<u>1.503.360.797</u>	<u>1.051.230.957</u>
	Saldo Akhir	C-5	<u>1.703.567.286</u>	<u>1.503.360.797</u>
	Dana Kumulatif Periode Lalu			
	Saldo Dana Kumulatif Awal		<u>17444241127</u>	<u>17444241127</u>
	Kenaikan (penurunan) dana Kumulatif			
	Jumlah Dana Periode Lalu	C-6	<u>17444241127</u>	<u>17444241127</u>

Gambar 3.8 Laporan Laba Rugi Masjid Al-Jihad Medan

YAYASAN MASJID AL-JIHAD MEDAN BARU

Laporan Arus Kas

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	2015	2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Kas Diterima dari				
	Penerimaan Dana Zakat		378.543.000	383.441.000
	Penerimaan Dana Tabungan Infaq		1.012.439.000	935.616.800
	Penerimaan Dan Pembangunan		383.085.000	302.308.000
	Penerimaan dana Ramadhan		276.076.000	261.225.800
	Penerimaan Parkir		<u>6.715.610</u>	<u>7.356.053</u>
	Penerimaan Bagi Hasil		<u>2.084.300.610</u>	<u>1.918.639.653</u>
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi				
Pengeluaran Kas untuk				
	Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah		(1.659.514.614)	(1.269.656.230)
	Pembayaran Dimuka		<u>(132.560.000)</u>	<u>(9.000.000)</u>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (a)			<u>292.225.996</u>	<u>639.983.423</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
	Pembelian/Penambahan Aset Tetap		<u>(436.030.064)</u>	<u>(271.341.883)</u>
Arus Kas Bersih dari Kegaitan Investasi (b)			<u>(436.030.064)</u>	<u>(271.341.883)</u>
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan ©				

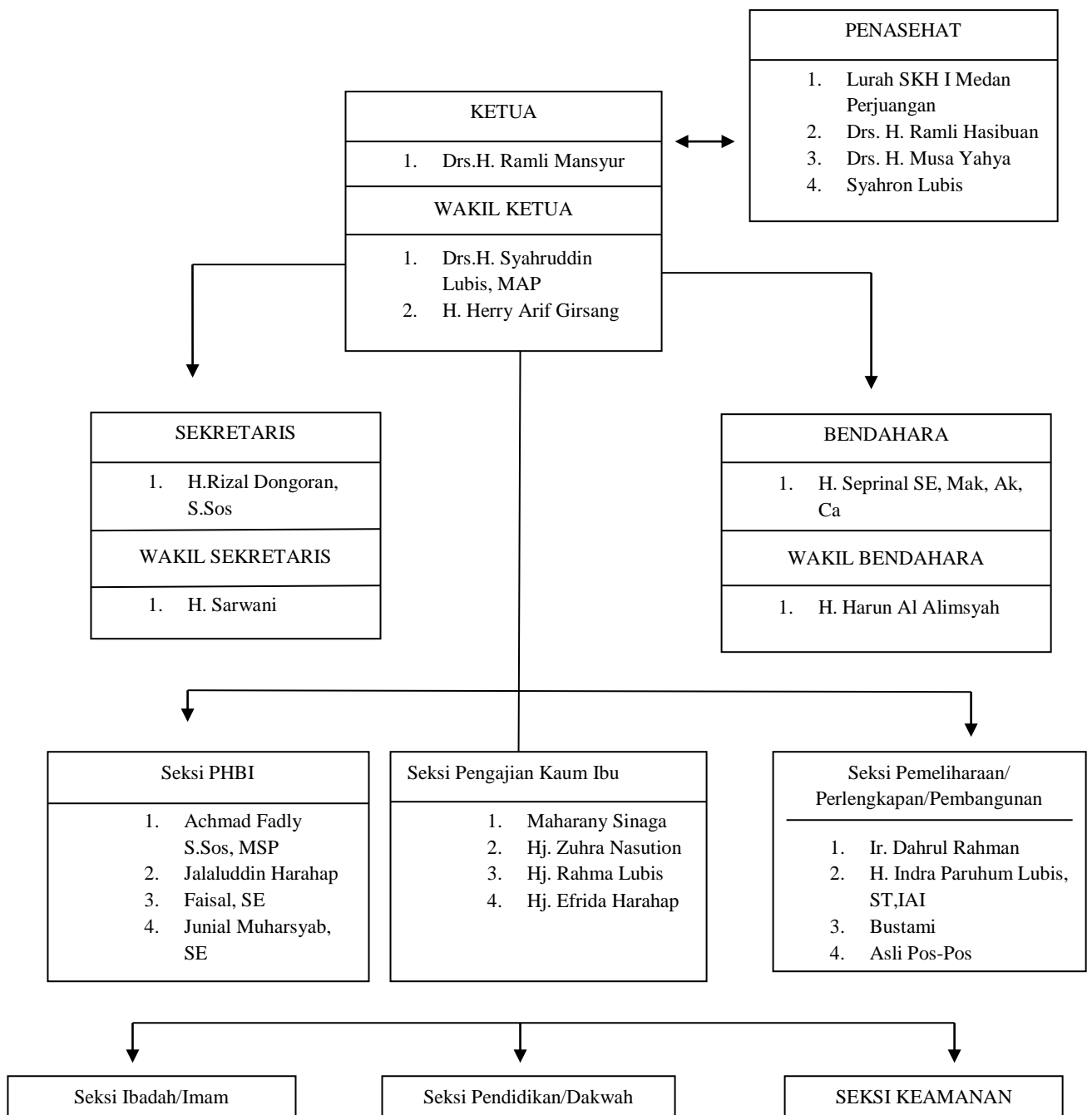
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas		(143.804.068)	(368.641.540)
Kas dan Setara Kas awal tahun		1.151.532.744	782.891.204
Kas dan Setara kas Akhir tahun	C-1	1.007.728.676	1.151.532.744

Gambar 3.9 Laporan Arus Kas Masjid Al-Jihad Medan

D. mbaran Umum Masjid Al-Falaah

Masjid Al-Falaah bertempat di Jl. Ibrahim Umar, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AL-FALAAH MEDAN



1. **oran Keuangan Masjid Al-Falaah Medan**

MASJID AL FALAAH
Laporan Mutasi Kas
Per 31 Maret 2017

No	Penerimaan	Jumlah	No	Pengeluaran	Jumlah
1	Saldo Awal Per 31 Des 2016	48.436.500	1	Pengajia Mingguan pagi 5 kali	1.250.000
2	Infaq Jum'at 6 Januari 2017	4.200.000	2	Pengajia Rutin malam 15 kali	3.000.000
3	Infaq Jum'at 13 Januari 2017	3.640.000	3	Khatib Jum'at 4 kali	1.150.000
4	Infaq Jum'at 20 Januari 2017	4.110.000	4	khatib cadangan 4 kali	400.000
5	Infaq Jum'at 27 Januari 2017	3.900.000	5	By cleaning servis 2 orang	1.600.000
6	kotak Infaq Masjid Bln Jan 2017	4.340.000	6	Muazin Jum'at 4 kali	200.000
7	Infaq Renovasi Masjid bln Jan2017	8.450.000	7	Beli karton dan paku payung	15.000
8	Infaq Hamba Allah	150.000	8	Biaya PLN bulan Januari 2017	600.000
			9	Pengajian ibu Masjid Al-Falaah	400.000
			10	Honor muazim Jan 2017	500.000
			11	Honor imam bulan Jan 2017	750.000
			12	Guru ngaji minggu	200.000
			13	Bantuan sosial	100.000
			14	Loundri mukena	100.000
			15	Bon kedai jaka	290.500
			16	Bantuan peng remaja	50.000
			17	Bon panglong Aldira	1.104.800
			18	Pembelian tepung & keramik	50.000
			19	Servis AC	1.400.000
			20	Upah tukang	14.200.000
			21	Pasir	320.000
			22	Fotocopy	137.500
			23	Pamplet busana muslim	800.000

			24	2 sak semen	100.000
			25	Perbaiki pipa air	100.000
			26	Bersih parit K M wanita	200.000
			27	Alat-alat listrik	1.000.000
				Total Pengeluaran	30.117.800
				Saldo Akhir 31 Januari 2016	47.108.700
	Jumlah	77.226.500		Jumlah	77.226.500

Gambar 3.10 Laporan Arus Kas Masjid Al-Falaah

E. Gambaran Umum Masjid Ar-Rahman Medan

Masjid Ar-Rahman Medan bertempat di Jl. Serdang Medang didirikan oleh HM Sahid Siregar tahun 1911 dan setelah seratus tahun dibangun kembali pada tahun 2011 dan diresmikan oleh DPD MRI Pusat Darmawanti Lubis dan Kapolsek Rantau AKB Ahmad Fauzi Dhalimunthe.

1. Laporan Keuangan Masjid Ar-Rahman

MASJID AR-RAHMAN

Laporan Mutasi Kas

Per 31 Maret 2017

No	Penerimaan	Jumlah	No	Pengeluaran	Jumlah
1	Saldo Aawal Per 31 Jan 2017	47.108.700	1	Pengajia umum (14x200.000)	2.800.000
2	Infaq Jum'at 03/02/2017	4.160.000	2	Pengajian mingguan pagi (4x250.000)	1.000.000
3	Infaq Jum'at 10/02/2017	3.810.000	3	Khatib Jum'at (4x300.000)	1.200.000
4	Infaq Jum'at 17/02/2017	5.180.000	4	Miazin sholat Jum'at (4x50.000)	200.000
5	Infaq Jum'at 24/02/2017	3.675.000	5	Khatib cadangan (3x100.000)	300.000
6	Tabungan infaq bln Feb 2017	3.420.000	6	By Cleaning Sevis 2 orang	1.650.000
7	Bantuan renovasi masjid	2.800.000	7	Bantuan pengajian RMAF (3x50.000)	150.000
8	Infaq Bp. Hamid	1.500.000	8	Honor imam rawatib	750.000

9	Infaq hamba Allah	50.000	9	Honor muazim Feb 2017	500.000
10	Infaq hamba Allah	400.000	10	Guru ngaji minggu	200.000
			11	Bantuan sosial	100.000
			12	Loundri mukena	100.000
			13	Tepung kramik 1 ktk	120.000
			14	pengajian ibu masjid Al-Falaah	400.000
			15	Biaya listrik Jan 2017	600.000
			16	Perbaikan pintu swing depan	100.000
			17	Kramik	10.540.000
			18	Upah tukang	9.300.000
			19	Buang bongkaran	300.000
			20	Pasir	900.000
			21	Alat-alat listrik	145.000
			22	Tong air	210.000
			23	Pembelian postek	17.900
			24	Pembelian kunci pintu Madrasa	178.000
				Total Pengeluaran	31.760.900
				Saldo Akhir 28 Feb 2017	403.428.000
	Jumlah	72.103.700		Jumlah	72.103.700

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Dalam pencatatan laporan keuangan masjid, ada beberapa komponen dalam pencatatan laporan keuangan tersebut, diantaranya yaitu:

- a) Neraca (laporan posisi keuangan) yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa aset, kewajiban dan net aset pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu.

Dalam penelitian ini saya melihat antara lima masjid yang berada di Medan, masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan posisi keuangannya (Neraca), masjid Agung juga telah melakukan pencatatan laporan posisi keuangannya, dan masjid Al-Jihad juga sama dengan masjid Al-Musabbihin dan Agung telah melakukan pencatatan laporan posisi keuangan, sedangkan masjid Al-Falaah tidak mencatat laporan posisi keuangan, dan masjid Ar-Rahman juga tidak melakukan pencatatan laporan posisi keuangan.

- b) Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung.

Dalam penelitian ini pencatatan yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, dan masjid Agung juga telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, begitu juga dengan masjid Al-Jihad juga telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, sedangkan dengan masjid Al-Falaah tidak melakukan pencatatan laporan operasional, begitu juga dengan masjid Ar-Rahaman juga tidak melakukan pencatatan laporan operasional.

- c) Laporan Arus Kas yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayarkan oleh suatu masjid periode tertentu.

Dalam penelitian ini pencatatan yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan arus kas masjid tersebut, masjid Agung juga mencatat laporan arus kas masjidnya, dan masjid Al-Jihad juga mencatat laporan arus kas masjidnya, begitu juga dalam pencatatan laporan yang dilakukan oleh masjid Al-Falaah dan Ar-Rahman juga telah mencatat laporan arus kasnya.

- d) Catatan Atas Laporan Arus Kas meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan atas laporan keuangan, masjid Agung juga telah melakukan pencatatan atas laporan keuangan, begitu juga dengan masjid Al-Jihad telah melakukan pencatatan atas laporan keuangannya, sedangkan dalam pencatatan laporan keuangan masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman tidak melakukan pencatatan atas laporan keuangan masjid tersebut.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan masjid, yang telah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan komponen laporan keuangan masjid yaitu masjid Al-Musabbihin, masjid Agung dan masjid Al-Jihad, sedangkan dalam penyajian laporan keuangan, masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk arus kas saja.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid pada 5 (*lima*) Masjid di Medan.

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memberikan

pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.²⁶

Berdasarkan teori tersebut prinsip akuntansi yang dilakukan oleh pengelola masjid untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan masjid yaitu kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan sepenuhnya, konsistensi, realisasi.

a. Kontinuitas usaha (*going concern*)

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang, sehingga masjid yang berada di Medan tetap berdiri tanpa adanya ancaman pengahancuran, pemindahan dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin adalah sebagai berikut:

*“Insya allah masjid Al-Musabbihin ini tidak akan terjadi pemindahan ataupun ancaman yang mengharuskan masjid untuk pindah, dan masyarakat setempat juga ikut senang dengan keadaan masjid tersebut, dimana kekuatan masjid ini juga telah dibuat Akta Notaris sehingga ada kekuatan hukum yang membela masjid ini”.*²⁷

Begitu juga disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung Medan menyatakan sebagai berikut:

*“kalau di sisi tidak akan terjadi ancaman seperti itu, walaupun letak masjid ini bersebelahan dengan Sun Plaza, dan Insyaallah masjid ini akan tetap berdiri”.*²⁸

Begitu juga dengan pernyataan Ivandi Putra bendahara masjid Al-Jihad menyatakan sebagai berikut:

*“insyaallah tidak akan terjadi likuidasi semacam itu, lagipula yayasan ini memiliki badan hukum yang melindunginya”.*²⁹

²⁶ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104.

²⁷ Arbie Abdul Gani, Bendahara Masjid, Wawancara Di Masjid Al-Musabbihin Komplek Setiabudi Medan, Tanggal 28 April 2017

²⁸ Mahmuzar Nasution, Bendahara Masjid, Wawancara Di Masjid Agung Medan, Tanggal 28 April 2017

Selanjutnya disampaikan juga oleh Ramli Mansyur ketua BKM masjid Al-Falaah sebagai berikut:

”tidak akan terjadi pemindahan masjid meskipun isu-isu tersebut ada juga, akan tetapi insyaallah masjid ini akan tetap berada ditempat itu”.³⁰

Begitu juga tanggapan dari Ibrahim ketua BKM masjid Ar-Rahman sebagai berikut:

“tidak akan terjadi likuidasi seperti itu dimasa yang akan datang, dan acamannyapun belum perna terjadi”.³¹

Sebagaimana penggolongan prinsip akuntansi masjid Al-Musabbihin, masjid Agung, masjid Al-Jihad, masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman tersebut telah memenuhi prinsip kontinuitas usaha.

b. Kesatuan Usaha (*Business Entit*)

Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. sehingga pelaporan keuangan masjid tersebut bisa transparansi tanpa adanya campur tangan dari pemilik masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid sebagai beriku:

*“Dimasjid ini antara pemilik perumahan dan pengelola masjid itu bedah, dan pengelola keuangannya pun pihak perumahan tidak ikut campur.”*³²

Begitu juga disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid sebagai berikut:

²⁹Ivandi Putra, Bendahara Masjid, Wawancara Di Masjid Al-Jihad Medan Baru, Tanggal 28 April 2017

³⁰Ramli Mansyur, Ketua BKM Masjid, Wawancara Di Masjid Al-Falaah, Tanggal 1 Mei 2017

³¹Ibrahim, Ketua BKM Masjid, Wawancara Di Masjid Al-Falaah, tanggal 30 April 2017

³²*Ibid.*

"dimasjid ini antara pemilik dan masjid itu pisah, dan berdiri sendiri".³³

Selanjutnya disampaikan oleh Ivandi Putra bendahara masjid sebagai berikut:

"masjid ini awal berdirinya sudah berbentuk yayasan dan antara pemilik dan masjid itu beda".³⁴

Begitu juga yang disampaikan oleh Ramli Mansyur bendahara masjid sebagai berikut:

"antara pemilik dan masjid itu terpisah dan berdiri sendiri".³⁵

Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibrahim ketua BKM masjid menyatakan sebagai berikut:

"Di Masjid ini terpisah antara pemilik dan masjid".³⁶

Dalam penelitian ini kesinambunga antara entitas atau masjid-masjid yang diteliti memiliki prinsip kesinambungan dimana tidak akan terjadi pemindahan ataupun penggusuran yang akan datang di masing-masing masjid tersebut.

c. Prinsip Periode Akuntansi (*Accounting Periode*)

kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan. Sehingga laporan keuangan masjid dapat disusun dengan mudah berdasarkan priode akuntansi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai beriku:

"pencatatan dan pelaporan keuanganya telah dilakukan per periode. Periode pencatatan keuangan pada masjid Al-Musabbihin dilakukan bulan dalam bentuk jurnal dan tiap tahun dalam bentuk laporan keuangan lengkap seperti Laporan Posisi

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Keuanga, Laporan Arus Kas, Laporan Oprasional atau Laba/rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.³⁷

Begitu juga yang dinyatakan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung medan sebagai beriku:

“Dimana pencatatan pelaporan keuangan masjid ini dicatata sesuai prinsip akuntansi dimana laporan keuangannya berbentuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas atau Laba/Rugi, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan”.³⁸

Selanjutnya pernyataan yang sama oleh Ivandi Putra bandahara masjid Al-Jihad sebagai beriku:

“pencatatan bulanannya menggunakan jurnal dan pencatatan tahunannya menggunakan laporan lengkap, seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas atau Laba/Rugi, serta Catatan Atas Laporan Keuangan”.³⁹

Selanjutnya peneliti menemukan perbedaan pencatatan laporan keuangan masjid tersebut dimana pencatatan laporan keuangan masjid tersebut hanya menggunakan satu dari 4 (empat) pelaporan akuntansi, dimana pencataan laporan keuanga masjid Al-Falaah hanya menggunakan Laporan Arus Kas. Dan dibukukan dalam bulanan. Sebagaimana pernyataan Ramli Mansyur ketua BKM masjid Al-Falaah sebagai berikut:

“pencatatan keuangan masjid ini sudah dicatata per periode akuntansi karena menurut kami laporan arus kas sudah mencukupi informasi keadaan kas masjid, dan penyusunannya pun mudah, dan kalau sesuai standar itu repot dan masyarakat tidak mengerti membaca itu”.⁴⁰

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid.*

Begitu juga pernyataan Ibrahim ketua BKM masjid Ar-Rahman sebagai berikut:

*“pencatatan keuangan masjid ini sudah dicatata per periode akuntansi, lantaran bendahara kami tidak tahu pencatatan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan kami hanya membuat laporan yang biasa dibuat masjid-masjid”.*⁴¹

Dalam prinsip ke tiga ini Masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Falaah dan Masjid Ar-Rahman sudah memenuhi prinsip ini hanya saja dalam masjid Al-Falaah dan Ar-Rahman hanya menggunakan Laporan Arus Kas saja dalam pencatatan keuangannya.

d. Prinsip Kesatuan Pengukuran (*Measurement Unit*)

Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan berdiri). Sehingga pencatatan laporan keuangannya selaras angka mata uang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“Masjid ini selama berdiri belum pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid, akan tetapi kalau jama'ah yang berinfaq pernah memberikan mata uang asing kepada masjid ini, seperti mata uang Ringgit Malaysia, akan tetapi mata uang ini langsung ditukarkan dengan mata uang Rupiah ketika akan digunakan untuk aktivitas masjid.

Dan sebagaimana juga dinyatakan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung Medan sebagai berikut:

“Masjid ini tidak pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid, akan tetapi dalam kotak infaq pernah ditemukan mata uang asing seperti Ringgit Malaysia dan Real

⁴¹*Ibid*

*Arab Saudi. Akan tetapi mata uang asing tersebut ditukarkan ketika ingin digunakan dalam transaksi masjid”.*⁴²

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh Ivandi Putra bendahara masjid Al-Jihad sebagai berikut:

*“Masjid ini tidak pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid tersebut”.*⁴³

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ramli Mansyur ketua BKM masjid Al-Falaah dan Ibrahim ketua masjid Ar-Rahman sebagai berikut:

*“Di masjid ini belum pernah menggunakan mata uang asing dalam kegiatann operasional masjid, akan tetapi dalam kotak infaq pernah ditemukan mata uang asing yaitu Ringgit Malaysia, dan ditukarkan kemata uang Rupiah ketika akan digunakan dalam aktivitas masjid”.*⁴⁴

Dari prinsip ke empat ini Masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Falaah dan Masjid Ar-Rahman telah memenuhi prinsip kesatuan pengukuran.

e. Prinsip Bukti Yang Objektif (*Objektif Evidence*)

Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada. Prinsip ini menekankan agar pembuktian dari pencatatan laporan keuangan masjid didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas, misalnya dari bukti kuitansi dan sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Arbie Abdul Gani sebagai berikut:

“Dalam aktivitas masjid telah menggunakan kuitansi dalam transaksinya, dimana kuitansi ini akan menjadi bukti yang

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

objektif dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangannya”.⁴⁵

Dan penelitian juga mewawancarai Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung sebagai berikut:

“Telah menggunakan kwitansi dalam aktivitas dan transaksi mesjid lainnya, dimana kwitansi ini menjadi bukti yang objektif dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangannya”.⁴⁶

Begitu juga ketiga masjid lainnya seperti masjid Al-Jihad, masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman setelah diwawancarai mereka menyatakan bahwa dalam prinsip bukti yang objektif telah dilakukan dan banyak bukti yang dibuat dalam bentuk kuitansi.

Dalam penelitian ini masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, masjid Al-Jihad, masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman telah memenuhi prinsip bukti yang objektif ini.

f. Prinsip Pengungkapan Sepenuhnya (*Full Disclosure*)

Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Sehingga jelas informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban-beban masjid tersebut. Dan peneliti melihat berbagai masjid ada yang menggunakan prinsip ini dan ada juga sebagian masjid yang belum menggunakan pengungkapan sepenuhnya dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagaimana peneliti mewawancarai Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“Masjid Al-Musabbihin telah memenuhi prinsip ini, karena semua yang berhubungan dengan laporan dicatat, dan dalam pencatatan laporan keuangannya sudah memenuhi standar, dimana komponen-komponen laporan keuangan masjid telah

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶*Ibid*

sepenuhnya dilakukan. Komponen-komponen di masjid Al-Musabbihin yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung dan Irvandi Putra bendahar masjid Al-Jihad sebagai berikut:

*“semua yang berhubungan dengan laporan dicatat, dan dalam pencatatan laporan keuangannya sudah memenuhi standar, dimana komponen-komponen laporan keuangan masjid telah sepenuhnya dilakukan. Komponen-komponen di masjid Al-Musabbihin yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”.*⁴⁷

Dan dalam penelitian saya mengenai masjid Al-Falaah dan Masjid Ar-Rahman berbeda dengan masjid-masjid sebelumnya, dari laporan keuangannya hanya menyusun laporan arus kas saja dalam pembuatan laporannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ramli Mansyur sebagai berikut:

*“Kita menyusun laporan hanya menggunakan laporan arus kas, dikarenakan masyarakat akan mudah membacanya dan kalau pun kita buat dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi itu mungkin akan muncul pertanyaan yang banyak dari masyarakat, dikarenakan banyak pembukuan yang kurang mereka ketahui, dan laporan arus kas ini cukup mudah dibuat”.*⁴⁸

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

Dan juga pernyataan yang hampir sama dengan Ramli Mansyur, Ibrahim juga menyatakan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“bendahara kami tidak mengetahui pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi, kami hanya tahu pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, kerana kami lihat kebanyakan masjid membuat laporan keuangan yang sma dengan kami”.⁴⁹

Jadi penelitian saya mengenai prinsip pengungkapan sepenuhnya di masjid Al-Musabbihin, masjid Agung, masjid Al-Jihad telah memenuhi prinsip pengungkapan sepenuhnya. Sedangkan masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman belum menggunakan prinsip pengungkapan sepenuhnya.

g. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan.

Sehingga akan mudah dibaca dari tahu ke tahu perputaran keuangan masjid tersebut. Dalam penelitian saya mengenai prinsip konsistensi sebagai berikut, menurut Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“Pembuatan laporan keuangan masjid Al-Musabbihin ini telah dicatat dari periode ke periode dengan metode yang sama”.⁵⁰

Begitu juga pernyataan yang sama juga dinyatakan Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung dan Irvandi Putra bendahara masjid Al-Jihad sebagai berikut:

“Dalam pencatatan masjid kami ini sudah dicatat dengan metode yang sama dari tahu ke tahun”.⁵¹

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

Dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ramli Mansyur ketua BKM masjid Al-Falaah dan Ibrahim ketua masjid Ar-Rahman sebagai berikut:

“Dalam pencatatan masjid kami ini sudah dicatat dengan metode yang sama dari tahu ke tahun”.⁵²

Dalam penelitian saya mengenai prinsip Konsistensi ini di 5 Lima masjid tersebut telah memenuhi prinsip konsistensi dimana pencatatan keuangannya dicatat dari suatu periode ke periode yang lain sehingga dapat diperbandingkan.

h. Prinsip Realisasi (*Matching Expense With Revenue*)

Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba/rugi periode berjalan.

Dalam penelitian saya ini pernyataan yang disampaikan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin dan Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung dan Irvandi Putra bendahara sebagai berikut:

“kami telah mencatat laporan laba/rugi dalam pembuatan laporan keuangan masjid ini, sehingga terlihat dengan jelas berapa besar beban-beban berjalan dan pendapatan masjid ini”.⁵³

Akan tetapi peneliti melihat perbedaan dalam prinsip ini terhadap masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman perbedaannya terlihat dari penyajian laporan keuangannya, keuangan masjid ini hanya menggunakan arus kas dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagai mana dinyatakan oleh Ramli Mansyur dan Ibrahim sebagai berikut:

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*

*“kalau pembuatan laporan laba atau rugi dimasjid ini tidak dilakukan, dikarenakan masjid bukan melihat untung atau ruginya, tetapi masyarakat hanya melihat perputaran kas masjid”.*⁵⁴

Jadi penelitian saya mengenai prinsip realisasi diantara 5 (lima) masjid, yang memenuhi prinsip realisasi hanya 3 (tiga) masjid yaitu masjid Al-Musabbihin, masjid Agung, dan Masjid Al-Jihad, sedangkan untuk masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman belum memenuhi prinsip realisasi ini.

Dalam penelitian ini persentase yang melakukan prinsip akuntansi masjid yang dilakukan masjid- masjid yang diteliti yaitu:

- a. Masjid Al-Musabbihin menerapkan prinsip akuntansi masjid sebesar 100%
- b. Masjid Agung menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
- c. Masjid Al-Jihad menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
- d. Masjid Al-Falaah menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 75%
- e. Masjid Ar-Rahman menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 75%

B. Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Masjid

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.⁵⁵

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salembah Empat, 2002), h. 146.

sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba. Namun demikian, dalam prakteknya organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.⁵⁶

Akuntabilitas pada laporan keuangan masjid ini akan menjadi pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan persamaan dari pertanggungjawaban laporan keuangan masjid, namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal penyajian laporan keuangan masjid tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid yang diteliti. Menurut Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

*“Dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid, kami memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman pada saat shalat Jum’at dan juga kami informasikan melalui media cetak seperti koran-koran dan menemperkannya di mading, dan respon masyarakat mengenai laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi mendapat respon yang positif”.*⁵⁷

Begitu juga menurut Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung sebagai berikut:

*“dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid Agung ini kami melakukan dengan cara menyampaikannya pada saat shalat Jum’at, dan pertanggungjawaban laporan keuangan kami cukup bagus karena ke transparannya masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid memberikan respon yang positif, dan kami akan meningkatkan kualitas laporan kami dari tahun ke tahun”.*⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan akuntabilitas kepada Irvandi Putra bendahara masjid Al-Jihad pernyataannya sebagai berikut:

⁵⁶*Ibid*, h. 219.

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

“selama ini sih belum ada yang mempertanyakan kualitas laporan keuangan masjid ini, akan tetapi dalam mempertanggungjawabkan laporan kami, kami memberi informasi mengenai laporan keuangan melalui pengumuman-pengumuman dari mading, ketika akan shalat Jum’at”.⁵⁹

Selanjutnya pernyataan dari Ramli Mansyur ketua masjid Al-Falaah sebagai berikut:

”dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid ini, kami para BKM melakukannya dengan cara memberikan informasi melalui tempel-tempel di mading dan juga memberikan informasi ketika akan dilakukan shalat Jum’at, dan kalau soal informasi yang kami berikan hanya saja mengenai kas masuk dan kas keluar”.⁶⁰

Selanjutnya pada penelitian mengenai masjid Ar-Rahman dari Ibrahim ketua BKM sebagai berikut:

“kalau mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid ini kami lakukan dengan cara mencatat semua transaksi yang kami lakukan untuk masjid ini, dan kami pun memberikan informasi keadaan keuangan kami melalui mading dan pengumuman pada saat akan shalat Jum,at”.⁶¹

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan.

1. pencatatan laporan keuangan masjid Al-Musabbihin, masjid Agung, dan masjid Al-Jihad melakukan pencatatan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam pencatatan laporan keuangan masjid Al-Falaah dan masjid Ar-Rahman hanya menggunakan pencatatan laporan arus kas.
2. Persentase masjid yang menerapkan prinsip akuntansi masjid
 - a. Masjid Al-Musabbihin menerapkan prinsip akuntansi masjid sebesar 100%
 - b. Masjid Agung menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
 - c. Masjid Al-Jihad menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
 - d. Masjid Al-Falaah menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 75%
 - e. Masjid Ar-Rahman menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 75%
3. Akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan:
 - a. Masjid Al-Musabbihin dengan cara menempelkan laporan keuangan operasionalnya di mading, dan diumumkan ketika akan melaksanakan shalat Jum'at.
 - b. Masjid Agung dengan cara menempel dimading, diumumkan ketika akan shalat Jum'at, dan di informasikan di surat kabar.
 - c. Masjid Al-Jihad dengan cara menempelkan dimading, diumumkan ketika akan shalat Jum'at.
 - d. Masjid Al-Rahman dengan cara menemperlkan dimading, diumumkan ketika akan shalat Jum'at

- e. Masjid Ar-Rahman dengan cara menempelkan dimading, dan diumumkan ketika akan shalat Jum'at.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka, penulis dapat mengajukan beberapa saran.

1. Dalam pencatatan laporan keuangan masjid yang masih belum menggunakan prinsip dan standar akuntansi masjid sebaiknya membuat lapora keuangan yang memadai, sehingga laporan keuangan masjid tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparansi, agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat disajikan dengan jelas dan baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Daftar Pustaka

- Ayub, Moh. E, ed. *Manajemen masjid: gema isni press*, Jakarta, 2009
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Bastian, Indra. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta, Erlangga, 2010
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* ,Jakarta : Salemba Empat 2013
- Departemen Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2
Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Effendi, Masri Singarumbun dan Sofian. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta:
Lp3es 1989
- Halim ,Abdul. *Akuntansi keuangan daerah*, Jakarta: Salemba Empat: 2002
- Hery. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana, 2011
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- James, M. Revee, et, al. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*,
Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Mursyidi. *Akuntansi Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010
- Mutniati. *Manajemen Statistik Peran Kepada Sekolah Dalam Pemberdayaan*.
Bandung: citapustaka. 2008
- Ruslan Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta: Ar-Ruszz Media,
2014

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D*. Jakarta, Erlangga 2013
- Samryn. *Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus akuntansi* ,Edisi Pertama, Revisi ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Salim. *Metodologi Penelitia Kualitatif Bandung*: Citapustaka Media, 2016
- Setiawan, Kaetum. *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*: Erlangga, Jakarta, 2010
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2014
- Sitompu, MhdSyahman ,et. al, *Akuntansi Masjid*, cetakan pertama: Febi UIN-SU Press. 2015
- Sule, Ernie Tisanawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama. Jakarta: Kencana. 2005
- Tarigan , Azhari Akmal et al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. La-Tansa.
- Udaya, Yusuf et al. *Manajemen Stratejik*, Yogyakarta: Graham Ilmu. 2013
- Umar, Husein. *Desain Penelitian : MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2008
- Wibowo, Abubakar Arif. *Pengantar Akuntansi II*: PT Grasindo, jl. Palmerah Selatan, 2004
- Yusup Pawit M. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* Jakarta: kencana, 2007